

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(PADA OPD KOTA MALANG)**

SKRIPSI



**Oleh :
Nur Fadila
NIM : 220502110088**

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**

2026

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(PADA OPD KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



**Oleh :
Nur Fadila
NIM : 220502110088**

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(PADA OPD KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh

Nur Fadila

NIM : 220502110088

Telah Disetujui Pada Tanggal 18 Juni 2026

Dosen Pembimbing,



Dr. Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS., CSRA., CFrA

NIP. 197710252009012006

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
(PADA OPD KOTA MALANG)**

SKRIPSI

Oleh
NUR FADILA
NIM : 220502110088

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 25 Juni 2026

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Isnan Murdiansyah, M.S.A

NIP. 198607212019031008

2 Anggota Penguji

Lutfi Ardhani, S.E., M.S.A

NIP. 198505282019031005

3 Sekretaris Penguji

**Dr. Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS.,
CSRA., CFA**

NIP. 197710252009012006

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Kholilah, M.S.A

NIP. 198707192019032010

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Fadila
NIM : 220502110088
Fakultas/Program Studi : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

"Pengaruh *Good Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Opd Kota Malang)"

adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Malang, 17 Juni 2026

Hormat Saya,


METERAI
TEMPEL
6AANX417532209
Nur Fadila
NIM: 220502110088

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamini, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan, serta kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan untuk sampai pada titik ini bukanlah perjalanan yang mudah. Banyak proses yang harus dilalui, banyak keraguan yang harus dihadapi, dan tidak sedikit cobaan yang datang silih berganti, baik dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Namun, dari setiap kesulitan tersebut, saya belajar untuk tetap bertahan dan terus melangkah.

Dengan penuh rasa syukur, karya ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang selalu menjadi alasan terbesar saya untuk terus berjuang. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta dukungan yang selalu diberikan dalam setiap keadaan. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar pengorbanan dan cinta yang telah diberikan kepada saya.

Almarhumah Nenek tercinta, terima kasih atas kasih sayang dan doa yang pernah diberikan kepada saya. Saya masih mengingat bagaimana nenek mengantarkan saya saat memulai perjalanan sebagai mahasiswa baru. Hari ini saya berhasil menyelesaikan pendidikan ini, tetapi nenek tidak lagi berada di sini untuk menyaksikannya. Meski demikian, nenek akan selalu menjadi bagian dari perjalanan dan pencapaian saya. Semoga Allah SWT menempatkan nenek di tempat terbaik di sisi-Nya.

Keluarga saya, yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas setiap dukungan, perhatian, dan kekuatan yang diberikan di tengah berbagai keadaan yang pernah saya lalui.

Diri saya sendiri, Nur Fadila. Terima kasih karena telah mampu bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun sering merasa lelah, takut, dan ragu. Terima kasih karena terus berusaha menyelesaikan setiap proses yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa seseorang sampai pada tujuannya. Saya bangga pada diri saya karena telah berhasil melewati berbagai tantangan untuk mencapai titik ini.

Sahabat dan teman-teman seperjuangan, yang selalu memberikan semangat, bantuan, motivasi, serta menemani saya selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan mengapa perjalanan ini terasa lebih ringan untuk dijalani.

Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

HALAMAN MOTTO

"It always seems impossible until it's done."

Nelson Mandela

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

"Kesuksesan bukanlah milik orang yang pintar. Kesuksesan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha."

B. J. Habibie

KATA PENGANTAR

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Kholilah, SE., MSA., Ak., CA., CFA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS., CSRA., CFA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan dan arahan penulisan skripsi ini dengan baik dan sabar.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Sahabat dan teman-teman terdekat yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih kepada Maysa, Keisha, Resti, Liza, Nisa, Elok, dan Feri atas bantuan, dukungan, semangat, serta kesediaannya untuk berbagi waktu dan pemikiran selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Kembar, Cahaya, dan Lily yang telah menjadi sahabat terbaik penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, cerita, tawa, dukungan, dan berbagai pengalaman yang telah dilalui

bersama. Kehadiran kalian memberikan banyak warna dan kenangan yang berharga selama perjalanan menempuh pendidikan ini.

8. Terima kasih kepada Lujeng dan Aidah yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta tempat singgah bagi penulis selama masa persiapan dan penyelesaian seminar proposal. Kebaikan dan perhatian yang diberikan menjadi salah satu hal yang sangat berarti dalam proses akademik yang penulis jalani.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang, bertahan, dan konsisten sampai akhir dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Kesabaran, ketekunan, dan keberanian yang saya tunjukkan di setiap tahap perjalanan ini menjadi kekuatan utama yang memungkinkan semua proses dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
.....	v
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
ABSTRAK	6
ABSTRACT	7
الملخص.....	8
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian	21
1.5 Batasan Penelitian	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
2.1 Penelitian Terdahulu	23
2.2 Kajian Teori	28
2.2.1 Agency Theory	28
2.2.2 Stewardship Theory	30
2.2.3 <i>Good Governance</i>	31
2.2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi	36
2.2.5 Sistem Pengendalian Internal	42
2.2.6 Kualitas Laporan Keuangan	47
2.3 Kerangka Konseptual	51
2.4 Hipotesis Penelitian	52
2.4.1 Hubungan <i>good governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan	52
2.4.2 Hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan	53
2.4.3 Hubungan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan	53
2.4.4 Hubungan <i>good governance</i> , pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan	54

BAB III METODE PENELITIAN	56
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
3.2 Lokasi Penelitian	56
3.3 Populasi dan Sampel	57
3.3.1 Populasi	57
3.3.2 Sampel	57
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	57
3.5 Data dan Jenis Data	58
3.6 Teknik Pengumpulan Data	59
3.6.1 Instrumen Penelitian	59
3.7 Definisi Operasional Variabel	60
3.7.1 Variabel Independen	60
3.7.2 Variabel Dependen	62
3.8 Analisis Data	64
3.8.1 Uji Validitas	64
3.8.2 Uji Reliabilitas	67
3.8.3 Uji Asumsi	68
3.8.4 Analisis regresi linear berganda	69
BAB IV	74
HASIL DAN PEMBAHASAN	74
4.1 Hasil Penelitian	74
4.1.1 Hasil Pengumpulan Data	74
4.1.2 Analisis Data	77
4.1.3 Uji Asumsi Klasik	78
4.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda	82
4.1.4 Uji T (Uji Parsial)	84
4.1.5 Uji Simultan (Uji – f)	86
4.1.6 Uji Koefisien Determinasi	88
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	89
4.2.1 Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan	89
4.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	93
BAB V.....	99
PENUTUP.....	99

5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103
DAFTAR LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020-2024	
.....	Kesa
lahan! Bookmark tidak ditentukan.	
Tabel 1. 2 APBD Kota Malang tahun 2022-2025.....	
.....	Kesa
lahan! Bookmark tidak ditentukan.	
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3 1 Jawaban dan Skor dalam Skala Likert	59
Tabel 3 2 Definisi Operasional Variabel, Indikator, dan Item Pertanyaan	63
Tabel 3 3 Uji Validitas Good governance (X1).....	65
Tabel 3 4 Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	65
Tabel 3 5 Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X3)	66
Tabel 3 6 Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan	67
Tabel 3 7 Hasil Uji Reabilitas Data.....	68
Tabel 4 1 Karakteristik Responden	74
Tabel 4 2 Deskripsi Jenis Kelamin Responden	76
Tabel 4 3 Deskripsi Lama Bekerja Responden.....	76
Tabel 4 4 Statistik Deskriptif.....	77
Tabel 4 5 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorv-Smirnov Test.....	79
Tabel 4 6 Hasil Uji Multikolinearitas	80
Tabel 4 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas	81

Tabel 4 8 Analisis Regresi Linear Berganda	83
Tabel 4 9 Hasil Uji t (Uji Parsial).....	85
Tabel 4 10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Secara Simultan (Uji F)...	87
Tabel 4 11 Uji Koefisien Determinasi (R Square).....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Hipotesis.....	
..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	

ABSTRAK

Nur Fadila, 2026, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada OPD Kota Malang)”

Pembimbing: Dr. Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS., CSRA., CFrA

Kata Kunci: Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good governance, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Ketiga variabel tersebut diasumsikan memiliki peran penting dalam meningkatkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevansi, keandalan, serta akurasi informasi yang dihasilkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 132 responden yang berasal dari OPD Kota Malang dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kota Malang. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dicapai melalui penguatan tata kelola pemerintahan, optimalisasi teknologi informasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal secara terpadu.

ABSTRACT

Nur Fadila, 2026, THESIS. Title: “*The Influence of Good Governance, Utilization of Information Technology, and Internal Control System on the Quality of Financial Statements (Study on Regional Apparatus Organizations of Malang City)*”

Supervisor: Dr. Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS., CSRA., CFrA

Keywords: Good Governance, Utilization of Information Technology, Internal Control System, Quality of Financial Statements

The quality of local government financial statements is a fundamental aspect in achieving accountability and transparency in public financial management. This study aims to analyze the influence of good governance, the utilization of information technology, and the internal control system on the quality of financial statements in the Regional Apparatus Organizations (OPD) of Malang City. These three variables are assumed to play an important role in improving the qualitative characteristics of financial reports, namely relevance, reliability, and accuracy of the information produced.

This study employs a quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to 132 respondents from various OPD units in Malang City using a purposive sampling technique. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of SPSS software to examine the partial and simultaneous effects of the independent variables on the dependent variable.

The results show that good governance, the utilization of information technology, and the internal control system each have a positive and significant effect on the quality of financial statements. Simultaneously, these three variables also have a significant influence on the quality of financial statements in the OPD of Malang City. These findings indicate that improving financial reporting quality can be achieved through strengthening governance practices, optimizing information technology, and enhancing the effectiveness of internal control systems in an integrated manner.

الملخص

نور فاديلة، ٢٠٢٦، أطروحة. العنوان: «تأثير الحوكمة الرشيدة، واستخدام ت، ونظام الرقابة الداخلية على جودة البيانات المالية (دراسة حول مؤسسات الجهاز تكنولوجيا المعلوماتا «الإداري الإقليمي لمدينة مالانج المشرفة: د. يونا أوكتاني ليستاري، بكالوريوس في الاقتصاد، ماجستير في علوم المحاسبة، متخصصة في المسؤولية الاجتماعية للشركات، مدققة معتمدة لتقارير الاستدامة، مدققة قانونية معتمدة الكلمات المفتاحية: الحوكمة الرشيدة، استخدام تكنولوجيا المعلومات، نظام الرقابة الداخلية، جودة البيانات المالية

تعد جودة البيانات المالية للحكومة المحلية جانباً أساسياً في تحقيق المساءلة والشفافية في إدارة المالية العامة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الحوكمة الرشيدة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ونظام الرقابة الداخلية على جودة البيانات المالية في مؤسسات الجهاز الإداري الإقليمي بمدينة مالانج. ويُفترض أن هذه المتغيرات الثلاثة تلعب دوراً مهماً في تحسين الخصائص النوعية للتقارير المالية، وهي: ملاءمة المعلومات، وموثوقيتها، ودقتها. تستخدم هذه الدراسة نهجاً كمياً باستخدام طريقة المسح. تم جمع البيانات من خلال استبيانات وزعت على ١٣٢ مشاركاً من مختلف وحدات المنظمات الإدارية الإقليمية في مدينة مالانج باستخدام تقنية العينات المحددة الغرض. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام الانحدار الخطي المتعدد بمساعدة برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية لفحص الآثار الجزئية والمتزامنة للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع. تُظهر النتائج أن الحوكمة الرشيدة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، ونظام الرقابة الداخلية، لكل منها تأثير إيجابي وهام على جودة البيانات المالية. وفي الوقت نفسه، تؤثر هذه المتغيرات الثلاثة أيضاً تأثيراً هاماً على جودة البيانات المالية في إدارة المشاريع العامة بمدينة مالانج. وتشير هذه النتائج إلى أنه يمكن تحسين جودة التقارير المالية من خلال تعزيز ممارسات الحوكمة، وتحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات، وزيادة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية بطريقة متكاملة.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pertanggungjawaban publik atas pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah. Melalui laporan keuangan, pemerintah daerah menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta kinerja pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya (Prawati & Murwaningsari, 2024). Laporan keuangan berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah dan sumber informasi bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan (Rivai et al., 2026). Sehingga pentingya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan, menurut Masyhur et al., 2017) Sebagai wujud akuntabilitas, laporan keuangan harus disajikan secara lengkap, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu pemerintahan yang menerapkan good governance ditandai dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas terhadap peraturan yang berlaku (Yuliani, 2017).

Kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari kemampuannya menyediakan informasi yang relevan, andal, tepat waktu, serta dapat dibandingkan. Penilaian ini mengacu pada karakteristik kualitatif informasi dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Gunawan & Arifin, 2023). Informasi keuangan yang berkualitas sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, politik, dan sosial oleh masyarakat. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan sering dijadikan indikator keberhasilan tata kelola sektor publik dan memperkuat legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakat (Yamin & Lawaidjo, 2025). Menurut studi dari Nurhikmah & Sisdianto, (2024) dengan menjaga integritas dan transparansi, akuntan dapat berkontribusi pada terciptanya sistem keuangan yang lebih adil dan dapat dipercaya. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian, mengingat masih terdapat berbagai kendala dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan yang dapat memengaruhi keandalan informasi yang disajikan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan publik. *Good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang menjadi landasan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan publik yang dapat dipertanggungjawabkan (Pangestu, 2025). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* diyakini mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih tertib, terbuka, dan bertanggung jawab (Hisyam & Habibi, 2024).

Penerapan *good governance* melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas-efisiensi, dan supremasi hukum mendorong pengawasan

internal yang efektif serta pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam organisasi pemerintahan. Menurut pendapat dari Perbawa & Najicha, (2022) Good governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi memastikan informasi keuangan tersedia secara terbuka, akuntabilitas mengharuskan pertanggungjawaban atas setiap keputusan anggaran, sedangkan efektivitas-efisiensi menjamin penggunaan sumber daya optimal. Kondisi tersebut dapat meminimalkan risiko kesalahan maupun manipulasi dalam penyusunan laporan keuangan (Mediaty et al., 2025).

Selain prinsip *good governance* dan pemanfaatan teknologi informasi, faktor lain yang tidak kalah penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah efektivitas sistem pengendalian internal. Sistem Pengendalian Internal (SPI) dipahami sebagai seperangkat kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai, khususnya terkait keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional (Ilyas, 2025). Dalam lingkungan pemerintahan daerah, SPI berperan sebagai alat pengawasan internal yang memastikan seluruh proses pengelolaan dan laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Selain faktor tata kelola melalui *good governance*, perkembangan teknologi informasi menjadi elemen strategis dalam upaya peningkatan kualitas

laporan keuangan sektor publik. Digitalisasi pengelolaan keuangan pemerintah mendorong terjadinya pergeseran dari sistem manual menuju sistem berbasis elektronik yang terintegrasi, sehingga proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien dan terstruktur (Afiuddin & Aminah, 2025). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berbasis teknologi informasi memungkinkan proses pencatatan dan laporan keuangan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan sistematis. Dengan dukungan teknologi informasi, pemerintah daerah dapat mengolah data keuangan secara lebih efektif sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih baik (Sati et al., 2024). Teknologi informasi juga mendukung penyediaan data keuangan secara *real time* yang berkontribusi terhadap peningkatan ketepatan waktu laporan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan konsistensi penerapan standar akuntansi pemerintah serta memudahkan proses audit dan pengawasan, sehingga laporan keuangan yang disusun menjadi lebih andal dan relevan bagi para pemangku kepentingan (Pongsibidang & Nugroho, 2023).

Adanya pemanfaatan teknologi efisiensi pengelolaan data, pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan secara lebih tepat waktu dan akurat. Ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi mendukung proses pemantauan dan evaluasi keuangan secara berkesinambungan, baik oleh pengawas internal maupun auditor eksternal. Kondisi tersebut mendorong terwujudnya laporan keuangan yang lebih terbuka, dapat dipercaya, serta selaras dengan ketentuan standar akuntansi pemerintahan yang (Rahma & Sugiartono, 2023). Meskipun penerapan prinsip *good*

governance dan pemanfaatan teknologi merupakan landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, keberhasilannya perlu didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif. Sistem pengendalian internal berperan dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahan maupun penyimpangan (Siregar et al., 2024).

Keberadaan SPI yang berjalan secara efektif sangat penting untuk menekan potensi kesalahan pencatatan, tindakan kecurangan, maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Melalui pengendalian internal yang baik, setiap transaksi keuangan dapat dicatat secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ayuningtyas et al., 2022) menyatakan bahwa pengendalian internal yang kuat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, terutama dalam hal keandalan informasi dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peningkatan tuntutan akuntabilitas sektor publik mendorong pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya dapat dilihat melalui opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini

audit tersebut mencerminkan tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan serta efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, beberapa pemerintah kota besar menunjukkan capaian opini audit yang relatif baik selama lima tahun terakhir. Pemerintah kota seperti Kota Surabaya, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada periode tahun 2020–2025.

Tabel 1. 1 Data Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020-2025

Kota	2021	2022	2023	2024	2025
Malang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Surabaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kediri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Madiun	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Probolinggo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD BPK RI Perwakilan Jawa Timur (2020–2025)

Menurut Tabel diatas, beberapa pemerintah kota di kota-kota besar Jawa Timur secara konsisten mencapai opini bersih (WTP) selama lima tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah secara umum memenuhi standar akuntansi pemerintah. Namun, opini WTP tidak sepenuhnya mencerminkan efektivitas manajemen keuangan daerah untuk setiap entitas pelaksana anggaran. Di antara pemerintah kota yang diteliti, penelitian ini memilih Kota Malang sebagai subjek karena Kota Malang telah menunjukkan pertumbuhan berkelanjutan dalam kapasitas fiskalnya, seiring dengan realisasi peningkatan anggaran pendapatan dan pengeluaran (APBD)

selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan kapasitas anggaran telah membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih kompleks, sehingga diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik, penggunaan teknologi informasi yang efektif, dan sistem pengendalian internal yang kuat untuk menghasilkan laporan keuangan berkualitas tinggi.

Tabel 1. 2 APBD Kota Malang tahun 2022-2025

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
2022	2,069T	2,172T	2,546T	2,188T
2023	2,378T	2,345T	2,830T	2,597T
2024	2,426T	2,466T	2,621T	2,456T
2025	2,388T	2,450T	2,564T	2.187T

Sumber: Diolah peneliti dari LKPD Kota Malang Tahun 2022–2025 dan Dokumen APBD Kota Malang Tahun 2022–2025.

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi pendapatan Pemerintah Kota Malang menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2022–2025. Realisasi pendapatan meningkat dari Rp2,17 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp2,45 triliun pada tahun 2025. Peningkatan kapasitas fiskal ini mencerminkan semakin besarnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. Meningkatnya pendapatan daerah menunjukkan perkembangan yang positif, namun pada saat yang sama juga menuntut pengelolaan keuangan yang lebih kompleks sehingga diperlukan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran.

Ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi dalam beberapa tahun terakhir, Selama periode 2022–2025, realisasi belanja selalu berada di bawah anggaran yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 realisasi belanja mencapai Rp2,19 triliun dari anggaran sebesar Rp2,55 triliun, pada tahun 2023 realisasi belanja sebesar Rp2,60 triliun dari anggaran Rp2,83 triliun, pada tahun 2024 realisasi belanja sebesar Rp2,46 triliun dari anggaran Rp2,62 triliun, dan pada tahun 2025 realisasi belanja sebesar Rp2,19 triliun dari anggaran Rp2,56 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah yang mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Selain itu studi dari Auliyana, (2017) menyatakan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimaknai oleh pejabat pemerintah daerah sebagai bentuk keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan yang menunjukkan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, para informan menyadari bahwa opini WTP tidak menjamin laporan keuangan bebas sepenuhnya dari penyimpangan maupun korupsi karena audit dilakukan berdasarkan prinsip materialitas dan keyakinan yang memadai. Maka, meskipun pendapatan daerah terus meningkat, tidak ada jaminan bahwa pengelolaan anggaran daerah sudah berjalan dengan efisien dan efektif.

Dalam konteks ini, meskipun Pemerintah Kota Malang berhasil mendapatkan opini WTP, ada celah yang perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengelolaan anggaran yang tidak selalu mencerminkan kualitas laporan

keuangan yang optimal. Fenomena ini membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan prinsip *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pada setiap OPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apakah penerapan *good governance*, penggunaan teknologi informasi yang efektif, dan penguatan sistem pengendalian internal dapat memperbaiki pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

Penelitian ini akan fokus pada mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan implementasi antara penerapan prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas) dan sistem pengendalian internal di tingkat OPD yang memengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan adanya peningkatan kapasitas fiskal, semakin penting untuk melihat apakah faktor-faktor seperti teknologi informasi yang digunakan dalam perencanaan dan laporan anggaran dapat mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Dalam hal ini, meskipun WTP telah dicapai, penelitian ini berfokus pada bagaimana faktor-faktor internal OPD berperan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien.

Hasil penelitian terkait pengaruh *good governance* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan temuan yang beragam. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi dan prinsip tata kelola yang baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Ayem & Amahala, 2023) membuktikan bahwa pemanfaatan

teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan ketepatan waktu dan keandalan informasi keuangan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Yamin & Lawaidjo, 2025) yang menyatakan bahwa teknologi informasi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan temuan terkait pengaruh *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa penelitian, seperti (Ayuningtyas et al., 2022) membuktikan bahwa *good governance* tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (Mediaty et al., 2025) menemukan bahwa *good governance* signifikan, Temuan ini menegaskan bahwa penerapan tata kelola yang baik, dukungan teknologi informasi mampu meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keuangan sektor publik.

Selanjutnya penelitian (Fiqih et al., 2024) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme pengendalian internal berperan penting dalam meningkatkan keandalan, akurasi, dan kualitas informasi keuangan sektor publik. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan fungsi pengawasan internal mampu mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian (Akbar & Choiriah, 2025) menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang mengindikasikan bahwa pengendalian internal yang diterapkan belum optimal dalam praktiknya.

Ketidakkonsistenan temuan penelitian terdahulu membuka peluang bagi dilakukannya penelitian lebih lanjut guna menguji hubungan antarvariabel yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Di samping itu, penelitian mengenai pengaruh *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan masih banyak terfokus pada pemerintah daerah secara agregat, sementara penelitian pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya pada OPD Kota Malang, masih relatif terbatas. Padahal, OPD merupakan unit kerja yang secara langsung bertanggung jawab dalam proses pencatatan, pengolahan, dan penyusunan laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian pada level OPD menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini didasarkan pada Agency Theory dan Stewardship Theory. Agency Theory menjelaskan bahwa hubungan antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent berpotensi menimbulkan asimetri informasi sehingga diperlukan mekanisme pengendalian melalui penerapan *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. Sementara itu, Stewardship Theory memandang bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk mengutamakan kepentingan organisasi serta masyarakat melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan demikian, kedua teori tersebut menjadi landasan dalam menjelaskan hubungan antara *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Malang?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang?
4. Apakah *good governance*, pemanfaatan informasi teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang.
2. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Malang.

3. Menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Malang.
4. Untuk mengetahui & menganalisis *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah (OPD Kota Malang)

Memberikan rekomendasi dan masukan bagi manajemen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang dalam meningkatkan penerapan prinsip *good governance*, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta memperkuat sistem pengendalian internal guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang akurat, transparan, andal, dan tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Bagi Akademisi

Memberikan kontribusi empiris dan menjadi referensi tambahan dalam pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui integrasi variabel *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi bahan rujukan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis pada pemerintah daerah lain, serta sebagai dasar untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel lain,

seperti kompetensi sumber daya manusia, integritas data, komitmen organisasi, atau budaya organisasi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Malang dengan responden yang merupakan pegawai yang terlibat dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan berdasarkan persepsi responden yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Oleh karena itu, hasil penelitian ini hanya menggambarkan kondisi pada OPD Kota Malang dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan pada pemerintah daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang memberikan validasi dan bukti. Berikut ini adalah beberapa temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul atau variabel yang diteliti:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Tahun	Variabel	Metode	Hasil
1	Menakar Kualitas Informasi LKPD: Pengaruh SPI, TI, Kualitas SDM, <i>Good Governance</i> , Kapasitas SDM	(Ayuningtyas et al., 2022)	2022	X: SPI, TI, Kualitas SDM, <i>Good governance</i> , Kapasitas SDM Y: Kualitas Informasi LKPD	Kuantitatif, Regresi Berganda, 124 responden	TI & Kualitas SDM positif, <i>Good governance</i> tidak signifikan.
2	Pengaruh Pemanfaatan TI, Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen	(Ayem & Amahala, 2023)	2023	X; TI, SIA, Komitmen Organisasi Y: Kualitas LKPD	Kuantitatif, Regresi Linier Berganda, 43 responden	TI & SIA positif signifikan, Komitmen tidak berpengaruh

	Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pemda Kota Yogyakarta)					
3	Pengaruh Penerapan SAP dan <i>Good Governance</i> terhadap Kualitas LKPD	(Tabupook, 2024)	2024	X: SAP, <i>Good Governance</i> Y: Kualitas LKPD	Kuantitatif, Regresi Linier Berganda, 70 pegawai	SAP & <i>good governance</i> positif signifikan parsial & simultan
4	Do <i>Accounting Information Systems,</i> Internal Control, IT Utilization, and HR Competence Affect Financial	(Widiasalwa et al., 2024)	2024	X: SIA, SPI, TI, Kompetensi SDM Y: Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif, Regresi Linier Berganda, 38 responden	SIA & TI signifikan. SPI & Kompetensi SDM tidak signifikan.

	Reports Quality?					
5	Human Competencie s: Amplifying Financial Reporting Quality in Indonesian Local Government	(Mediaty et al., 2025)	2025	X: <i>Good Governance</i> , Pemanfaatan TI; M: Kompetensi SDM Y: Kualitas Pelaporan Keuangan	Kuantitatif, SEM-PLS, 240 responden	<i>Good governance & TI signifikan, Kompetensi SDM memperkuat hubungan</i>
6	Exploring the Determinants of Financial Reporting Quality in Brebes Regency Local Government	(Wisudanti & Indriastuti, 2025)	2025	X: <i>Good Governance</i> , Pemanfaatan TI; Moderasi: SAP Y: Kualitas Pelaporan Keuangan	Kuantitatif, Regresi Linier Berganda, 120 pegawai	<i>Good governance & TI positif signifikan, SAP memperkuat pengaruh TI</i>
7	Good Governance, Organization al Commitment, and IT Utilization on	(Drilia et al., 2025)	2025	X: <i>Good Governance</i> ; Moderasi: TI Y: Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif, SEM SmartPLS, 150 responden	<i>Good governance signifikan; TI memperkuat hubungan</i>

	Financial Report Quality in Regional Government Organization					
8	Pengaruh SIKD dan <i>Good Governance</i> terhadap Kualitas LKPD Pengaruh SIKD dan <i>Good Governance</i> terhadap Kualitas LKPD	(E. Y. Putri & Sundari, 2025)	2025	X: SIKD (TI), <i>Good Governance</i> Y: Kualitas LKPD	Kuantitatif, Regresi	SIKD & <i>good governance</i> positif signifikan
9	<i>The Role of Financial Literacy, Financial Technology Utilization, and Digital</i>	(Siska et al., 2025)	2025	X: Literasi Keuangan, TI, Pendidikan Digital	Kuantitatif, Regresi Linier, 300 responden	Literasi & TI positif; Pendidikan digital memperkuat efek TI

	<i>Education in Improving Financial Planning Among Indonesian Millennials</i>			Y: Kualitas Perencanaan Keuangan		
10	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan SAP terhadap Kualitas LK SKPD Kota Surabaya	(Stirilita, n.d.)	2025	X: <i>Good Governance</i> , SAP Y: Kualitas LK	Kuantitatif, Regresi Linier Berganda	<i>Good governance & SAP</i> positif signifikan <i>Good governance & SAP</i> positif signifikan
11	<i>The Effect of Good Governance, Internal Control, and HR Competence on the Quality of Financial</i>	(Akbar & Choiriah, 2025)	2025	X: <i>Good Governance</i> , Internal Control, HR Competence Y: Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif, Regresi Linier Berganda	Kompetensi SDM berpengaruh signifikan; Pengendalian internal tidak signifikan

12	<i>The Moderating Role of HR Competencies on the Quality of Financial Reporting in Local Governments</i>	(Yamin & Lawaidjo, 2025)	2025	X: <i>Good Governance</i> , TI, Pengendalian Internal; M: Kompetensi SDM Y: Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif, SEM-PLS	Kompetensi SDM memoderasi pengaruh Pengendalian Internal, TI tidak signifikan
----	--	--------------------------	------	--	----------------------	---

Data: Diolah oleh peneliti (2026)

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Agency Theory

2.2.1.1 Pengertian Agency Theory

Menurut Jensen dan Meckling (1976), Agency Theory Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal sebagai pihak yang memberikan mandat dan agen sebagai pihak yang menerima mandat untuk mengelola sumber daya serta mengambil keputusan atas nama prinsipal.

Hubungan keagenan timbul karena adanya pendelegasian wewenang. Ketika prinsipal tidak mengelola langsung sumber daya yang dimilikinya, maka pengelolaan tersebut dipercayakan kepada agen. Namun, pendelegasian ini berpotensi menimbulkan permasalahan karena agen umumnya memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan prinsipal. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi. Ketidakseimbangan informasi tersebut dapat membuka

peluang terjadinya konflik kepentingan dan perilaku oportunistik apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

Dalam konteks sektor publik, masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola sumber daya dan keuangan publik. Karena pemerintah daerah memiliki penguasaan informasi yang lebih besar terkait pengelolaan anggaran, maka diperlukan sistem pertanggungjawaban yang mampu menjembatani kesenjangan informasi tersebut. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Melalui laporan yang berkualitas, potensi penyimpangan dapat ditekan serta kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan (Mark Bovens, 2007).

2.2.1.2 Konsep Agency Theory

Konsep utama Agency Theory menekankan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen mengandung potensi konflik kepentingan akibat asimetri informasi. Ketika agen memiliki informasi yang lebih luas dibandingkan prinsipal, maka muncul risiko moral hazard yang dapat menimbulkan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik. Untuk mengurangi risiko tersebut, diperlukan mekanisme pengendalian yang efektif guna menekan biaya keagenan (*agency cost*).

Dalam konteks pemerintahan daerah, mekanisme pengendalian tersebut diwujudkan melalui tiga instrumen utama. Pertama, *good governance* berfungsi memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi sehingga mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan akurasi, ketepatan

waktu, dan keterandalan proses pencatatan serta laporan keuangan, sehingga memperkecil peluang manipulasi data. Ketiga, sistem pengendalian internal bertindak sebagai mekanisme pengawasan formal yang membatasi perilaku oportunistik dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan dalam proses laporan keuangan.

2.2.2 Stewardship Theory

2.2.2.1 Pengertian Stewardship Theory

Stewardship Theory pertama kali dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori ini menjelaskan bahwa seorang pengelola (steward) memiliki kecenderungan untuk bertindak demi kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Berbeda dengan Agency Theory yang mengasumsikan adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen, Stewardship Theory beranggapan bahwa manajer atau pengelola merupakan individu yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Dalam konteks sektor publik, aparatur pemerintah berperan sebagai steward yang diberikan amanah oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, aparatur pemerintah diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah.

2.2.2.2 Konsep Stewardship Theory

Stewardship Theory menekankan bahwa keberhasilan organisasi akan tercapai apabila setiap aparatur pemerintah menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam penelitian ini, penerapan *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal merupakan bentuk dukungan organisasi yang memungkinkan aparatur pemerintah menjalankan fungsi stewardship secara optimal. Semakin baik penerapan ketiga aspek tersebut, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.

2.2.3 Good Governance

2.2.3.1 Pengertian Good Governance

Good governance merupakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang menekankan pelaksanaan kekuasaan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sehingga tujuan organisasi publik tercapai serta kepentingan masyarakat terpenuhi. Implementasi prinsip-prinsip *good governance* mendorong pemerintah untuk mengelola sumber daya publik secara efektif dan efisien dengan keterbukaan informasi serta kepatuhan pada peraturan yang berlaku, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi bersih dan dapat dipercaya oleh publik (Purwanti, 2022).

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, *good governance* berperan sebagai mekanisme pengendalian yang mendorong pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan secara jujur, tepat waktu, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Tata kelola yang baik tercermin melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta integritas aparatur pemerintah, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Prawati & Murwaningsari, 2024).

(Noriwari et al., 2025) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan *good governance* sangat bergantung pada komitmen seluruh unsur pemerintahan dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten. *Good governance* tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan formal, tetapi juga dengan perilaku dan etika aparatur dalam melaksanakan pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, *good governance* dapat dipahami sebagai sistem tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas guna meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat kepercayaan publik.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, *good governance* dapat didefinisikan sebagai sistem tata kelola pemerintahan yang mengatur bagaimana kewenangan dan sumber daya publik dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. *Good governance* mencakup penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, *good governance* menunjukkan sejauh mana praktik pengelolaan pemerintahan mampu mendukung terciptanya laporan keuangan yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan publik (Jannah et al., 2025).

Selain penjelasan yang didasarkan pada teori konvensional, *good governance* juga diatur secara syariah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah QS. An-Nisa ayat 58:

اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمَانَتِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa: 58)

Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan kewajiban bagi setiap pemegang amanah, termasuk aparatur dan pimpinan pemerintahan, untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya secara adil dan bertanggung jawab. Amanah dalam ayat ini mencakup seluruh bentuk tanggung jawab publik, termasuk pengelolaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban. Makna tersebut sangat relevan dengan konsep *good governance* yang menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip tersebut diperkuat oleh firman Allah SWT dalam **Surah QS. Al-Anfal ayat 27**:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمَانَتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ آيَاهَا يَا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan jangan pula kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27)

Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap pengkhianatan amanah, termasuk penyalahgunaan jabatan dan pengelolaan keuangan publik yang tidak sesuai ketentuan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pengkhianatan amanah mencakup segala bentuk penyimpangan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada seseorang, baik dalam urusan pribadi maupun urusan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, aparatur pemerintah dituntut untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap pelaksanaan tugas.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang berlandaskan amanah, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam konteks *good governance*, nilai-nilai ini menuntut pemerintah untuk mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat disajikan secara jujur, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, prinsip syariah sejalan dengan konsep *good governance* modern dalam mendukung terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik serta meningkatkan kepercayaan publik.

2.2.3.2 Indikator *Good Governance*

(Mediaty et al., 2025) menyatakan bahwa terdapat beberapa indikator dari *good governance*, yaitu:

- a.) Transparansi

yaitu sejauh mana pemerintah daerah bersikap terbuka dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya informasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan laporan keuangan. Semakin mudah akses informasi yang diberikan, maka semakin baik penerapan *good governance* yang dijalankan.

b.) Akuntabilitas

merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan. Semakin jelas dan tepat waktu laporan keuangan yang disusun, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah daerah.

c.) Partisipasi

yaitu keterlibatan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal pemerintah, dalam proses pengambilan keputusan serta pengelolaan keuangan daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi, maka semakin baik kualitas tata kelola pemerintahan yang diterapkan.

d.) Efektivitas dan Efisiensi

merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan tidak berlebihan mencerminkan penerapan *good governance* yang baik.

e.) Kepatuhan terhadap Peraturan

yaitu sejauh mana pemerintah daerah menjalankan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap aturan, maka semakin kecil risiko terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2.3.3 Hubungan *Good Governance* dengan *Stewardship Theory*

Stewardship Theory yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan diterapkannya *good governance* secara optimal, aparatur pemerintah diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2.2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.2.4.1 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi pada dasarnya merupakan penggunaan perangkat dan sistem berbasis teknologi untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan agar berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam organisasi, teknologi dimanfaatkan untuk membantu proses pengolahan data, penyampaian informasi, serta penyelesaian tugas secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi yang optimal mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hasil pekerjaan karena proses kerja menjadi lebih terstruktur dan minim kesalahan. Hal ini sejalan dengan temuan (Ayem & Amahala, 2023) yang menyatakan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas proses laporan melalui pengolahan data yang lebih sistematis dan akurat.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kesiapan pengguna dalam mengoperasikannya. Teknologi yang canggih tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai. (Ayuningtyas et al., 2022) menegaskan bahwa keterbatasan kemampuan pengguna dapat menghambat efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dalam laporan keuangan. Temuan serupa juga disampaikan oleh (Widiasalwa et al., 2024) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berperan penting dalam menentukan keberhasilan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu.

Dalam sektor publik, khususnya pada pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penggunaan teknologi memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, dan laporan keuangan dilakukan secara terintegrasi, tepat waktu, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Hasil ini diperkuat oleh (Ayem & Amahala, 2023) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah mampu

meningkatkan keandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan, sehingga informasi yang dihasilkan lebih mudah diakses dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan berbagai pendapat dan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi secara terencana dan optimal untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan dalam suatu organisasi. Pemanfaatan teknologi tidak hanya mencakup penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga melibatkan kesiapan serta kemampuan pengguna dalam mengoperasikannya. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai, organisasi termasuk pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi kerja, kualitas informasi, serta efektivitas pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dari perspektif Islam, pemanfaatan teknologi informasi juga harus dilandasi dengan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam penggunaannya. Teknologi informasi dipandang sebagai sarana yang dapat membantu manusia dalam mengelola, menyampaikan, dan memanfaatkan informasi secara lebih efektif, selama digunakan untuk tujuan yang benar dan memberikan kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS.

Al-‘Alaq ayat 1–5:

بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذِي ۝ الْأَكْرَمُ وَرَبُّكَ أَفْرَأُ ۝ عَلَقٍ مِنَ الْإِنْسَانِ خَلَقَ ۝ خَلَقَ الَّذِي رَبِّكَ بِاسْمِهِ أَفْرَأُ ۝
يَعْلَمُ لَمْ يَلَمْ مَا الْإِنْسَانُ عَلَّمَ ۝

Artinya: *“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang mengajar (manusia) dengan perantara pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”*

Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan perintah untuk membaca, belajar, dan memanfaatkan sarana pengetahuan sebagai bentuk pengembangan ilmu. Dalam konteks organisasi, teknologi informasi dapat dipahami sebagai “pena” modern yang digunakan untuk mengolah dan menyebarkan informasi secara sistematis dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi yang baik memungkinkan organisasi menghasilkan informasi yang berkualitas, tepat waktu, dan dapat dipercaya, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.

Menurut Quraish Shihab (2011) dalam *Tafsir Al-Misbah*, QS. Al-‘Alaq ayat 1–5 menunjukkan bahwa Allah mengajarkan manusia melalui sarana dan alat yang memungkinkan berkembangnya ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu, termasuk teknologi informasi, merupakan bagian dari sunnatullah dalam pengembangan peradaban manusia. Dalam dunia kerja, pemanfaatan teknologi informasi berarti menggunakan sistem dan perangkat secara amanah, jujur, dan proporsional untuk mendukung efektivitas pekerjaan serta meningkatkan kualitas informasi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi sejalan dengan nilai-nilai Islam apabila digunakan secara optimal dan bertanggung jawab demi mencapai kemaslahatan bersama.

2.2.4.2 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan penelitian (Mediaty et al., 2025) pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

a.) Proses kerja secara elektronik

pelaksanaan kegiatan atau aktivitas kerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem komputer sebagai sarana utama. Proses ini mencakup penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan digital untuk mengolah data, menyimpan dokumen, serta mendukung komunikasi dan laporan secara lebih efisien dan terintegrasi.

b.) Pengolahan dan penyimpanan data keuangan

Pengolahan dan penyimpanan data keuangan merupakan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, serta penyimpanan transaksi keuangan dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyimpanan data dilakukan secara sistematis dalam basis data (database) guna menjamin keamanan, integritas, serta kemudahan akses informasi dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial.

c.) Pengolahan informasi dengan jaringan internet

Pengolahan informasi dengan jaringan internet adalah pemanfaatan teknologi jaringan untuk mengumpulkan, mengirimkan, mengakses, dan mendistribusikan informasi secara daring (online). Indikator ini mencerminkan penggunaan sistem berbasis web atau aplikasi digital yang

memungkinkan pertukaran data secara cepat, efisien, dan real-time, baik di dalam maupun di luar organisasi.

d.) Sistem manajemen

Sistem manajemen merupakan suatu mekanisme atau kerangka kerja terstruktur yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, serta mengendalikan aktivitas organisasi. Dalam konteks teknologi informasi, sistem manajemen didukung oleh sistem informasi manajemen yang menyediakan data dan informasi yang relevan guna menunjang efektivitas pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan organisasi.

e.) Perawatan dan pemeliharaan pada perangkat komputer

Perawatan dan pemeliharaan perangkat komputer adalah serangkaian kegiatan preventif dan korektif yang dilakukan untuk menjaga kinerja perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) agar tetap optimal. Kegiatan ini meliputi pembaruan sistem, perlindungan keamanan data, pemeriksaan rutin, serta perbaikan apabila terjadi gangguan, sehingga kontinuitas operasional organisasi dapat terjamin.

2.2.4.3 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Agency

Theory

Agency Theory menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* berpotensi menimbulkan asimetri informasi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk mendukung penyajian informasi keuangan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses. Dengan demikian, teknologi informasi dapat mengurangi

kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.2.5 Sistem Pengendalian Internal

2.2.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, terutama dalam menjaga efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan. (Commission, 2013) mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen dan seluruh personel organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dalam sektor publik, (Mediaty et al., 2025) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kelima komponen tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. (Fiqih et al., 2024) menemukan bahwa pengendalian internal yang kuat mampu meningkatkan keandalan serta ketepatan informasi keuangan. Namun, (Atharrizka et al., 2021) menegaskan bahwa pengaruh tersebut sangat bergantung pada kualitas implementasi dan komitmen manajemen. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, sistem pengendalian internal dapat dipahami sebagai proses terintegrasi yang berfungsi mengendalikan risiko, melindungi aset, serta

memastikan laporan keuangan disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, sistem pengendalian internal dapat dipahami sebagai suatu proses yang terintegrasi dalam organisasi dan dirancang untuk mengelola risiko serta menjamin tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Sistem ini meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan yang diterapkan secara berkelanjutan dan konsisten. Dengan demikian, sistem pengendalian internal mencerminkan kemampuan organisasi dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan serta menyajikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain berdasarkan teori konvensional, sistem pengendalian internal juga memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip pencatatan dan transparansi ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

... فَأَكْتُبُوهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ يَدَيِّنِ تَدَايُنْتُمْ إِذَا أَمْتُوا الَّذِينَ أُيَّهَا يَٰ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”*

Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan transaksi secara jelas dan sistematis sebagai bentuk kehati-hatian dan transparansi. Prinsip ini sejalan dengan sistem pengendalian internal yang menuntut adanya dokumentasi yang akurat agar setiap aktivitas keuangan dapat dipertanggungjawabkan serta meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan. Selain itu, prinsip pengawasan ditegaskan dalam QS. Qaf ayat 18:

عَتِيدٌ رَقِيبٌ لَدَيْهِ إِلَّا قَوْلٌ مِّن يُلْفِظُ مَا

Artinya: *“Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.”*

Ayat ini menunjukkan adanya pengawasan yang terus-menerus (monitoring), yang dalam konteks organisasi mencerminkan pentingnya evaluasi dan pengendalian berkelanjutan terhadap setiap aktivitas.

Prinsip amanah dan akuntabilitas juga diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW:

رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْنُونٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ

Artinya: *“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab atas tugas yang diembannya. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

يُثَقِّقُهُ أَنْ عَمَلًا أَحَدُكُمْ عَمِلَ إِذَا يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan (profesional dan sungguh-sungguh).”* (HR. Al-Baihaqi).

Dengan demikian, Al-Qur'an dan Hadits menegaskan bahwa sistem pengendalian internal tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan spiritual seperti pencatatan yang transparan, pengawasan berkelanjutan, amanah, tanggung jawab, dan profesionalisme. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola organisasi yang

akuntabel, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT.

2.2.5.2 Indikator Sistem Pengendalian Internal

(Mediaty et al., 2025) Pengendalian Internal terdapat lima komponen atau indikator, yaitu:

a.) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama dalam sistem pengendalian internal. Komponen ini mencerminkan sikap, kesadaran, serta komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pentingnya pengendalian dalam organisasi. Lingkungan pengendalian tercermin dari integritas dan nilai etika yang diterapkan, struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas, serta kebijakan sumber daya manusia yang mendukung kompetensi pegawai.

b.) Penilaian Internal

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, termasuk risiko dalam penyusunan laporan keuangan. Risiko tersebut dapat berupa kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, hingga potensi terjadinya kecurangan.

c.) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi keuangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Komponen ini meliputi otorisasi transaksi,

pemisahan fungsi antara pencatatan dan penyimpanan aset, rekonsiliasi secara berkala, serta dokumentasi yang memadai.

d.) Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi berkaitan dengan sistem penyediaan serta penyampaian informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang membutuhkan. Sistem informasi akuntansi yang memadai akan membantu proses pengolahan data keuangan secara sistematis dan terintegrasi.

e.) Pemantauan

Pemantauan merupakan proses evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal. Pemantauan dapat dilakukan melalui kegiatan audit internal, reviu manajemen, maupun tindak lanjut atas temuan pemeriksaan dari aparat pengawas eksternal.

2.2.4.4 Hubungan Sistem Penengendalian Internal dengan Agency Theory

Agency Theory menyatakan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* memerlukan mekanisme pengendalian untuk meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Sistem Pengendalian Internal berperan sebagai mekanisme tersebut dengan memastikan bahwa setiap aktivitas pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.2.6 Kualitas Laporan Keuangan

2.2.6.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pada dasarnya menggambarkan sejauh mana laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selanjutnya, (Sipahutar et al., 2025) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan mencerminkan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik, sehingga informasi yang disajikan dapat digunakan untuk menilai kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah. Sejalan dengan itu, (Lestari, 2023) menegaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus disusun secara jujur, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar dapat dipercaya oleh pengguna informasi.

Kualitas laporan keuangan juga berkaitan erat dengan ketepatan waktu dan keandalan informasi yang disajikan. Menurut (Wijayanti & Kartikasarii, 2025), kualitas laporan keuangan menunjukkan kemampuan organisasi dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan akuntansi. Selanjutnya, (E. Y. Putri & Sundari, 2025) menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas akan memudahkan pengguna dalam memahami kondisi keuangan serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Sementara itu, (Ayem & Amahala, 2023) menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem dan teknologi yang digunakan dalam proses pencatatan dan laporan, karena sistem yang baik akan menghasilkan

informasi yang lebih andal. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan tingkat ketepatan, keandalan, dan kegunaan informasi keuangan yang disajikan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam perspektif Islam, kualitas informasi, termasuk laporan keuangan, harus disusun berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Informasi keuangan wajib dicatat secara jelas dan akurat agar tidak menimbulkan kerugian maupun ketidakadilan bagi pihak lain. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang menegaskan pentingnya pencatatan transaksi secara benar dan adil:

بِالْعَدْلِ كَاتِبَ بَيْنَكُمْ وَلِيَكْتُبَ ۖ فَامْتَنُواهُ مُسَمًّى أَجَلٍ إِلَىٰ بِدَيْنٍ تَدَايَنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

ع

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar (adil).”
(QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pencatatan yang benar, jelas, dan dapat dipercaya merupakan kewajiban dalam Islam. Selain itu, Allah SWT juga menegaskan pentingnya ketepatan dan keadilan dalam setiap pengukuran sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Isra’ ayat 35:

تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرَ ذَلِكَ ۖ الْمُسْتَقِيمَ بِالْقِسْطِ وَزِنُوا كِلْتُمَا إِذَا الْكَيْلَ وَأَوْفُوا

Artinya:

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih baik dan sebaik-baik akibatnya.” (QS. Al-Isra’: 35)

Lebih lanjut, kualitas laporan keuangan juga berkaitan erat dengan amanah dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada pihak yang berhak. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam QS. An-Nisa’ ayat 58:

﴿ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِكُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمَانَتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.” (QS. An-Nisa’: 58).

Menurut Quraish Shihab (2011) dalam *Tafsir Al-Misbah*, ayat ini menegaskan bahwa amanah mencakup seluruh bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi secara jujur dan proporsional. Dalam konteks laporan keuangan, laporan yang disusun merupakan amanah yang wajib disampaikan secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan dalam perspektif Al-Qur’an tidak hanya diukur dari kesesuaian dengan standar akuntansi, tetapi juga dari penerapan nilai kejujuran, keadilan, dan amanah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada manusia dan kepada Allah SWT.

2.2.6.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta didukung oleh penelitian (Mediaty et al., 2025), kualitas laporan keuangan dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

a.) Relevan

Relevansi menunjukkan sejauh mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki manfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki nilai prediktif, nilai umpan balik, dan disajikan tepat waktu sehingga dapat digunakan secara optimal oleh pihak yang berkepentingan.

b.) Andal

Keandalan berkaitan dengan tingkat kejujuran dan ketepatan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dikatakan andal apabila bebas dari kesalahan material, tidak menyesatkan, serta dapat dipercaya sebagai dasar dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu organisasi.

c.) Dapat dibandingkan

Dapat dibandingkan menunjukkan bahwa informasi dalam laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk membandingkan kondisi keuangan antar periode maupun dengan entitas lain. Konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi akan memudahkan pengguna dalam melakukan perbandingan tersebut.

d.) Dapat dipahami

Dapat dipahami berkaitan dengan sejauh mana laporan keuangan disajikan secara jelas dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang kegiatan dan akuntansi. Penyajian informasi yang jelas akan meningkatkan kegunaan laporan keuangan.

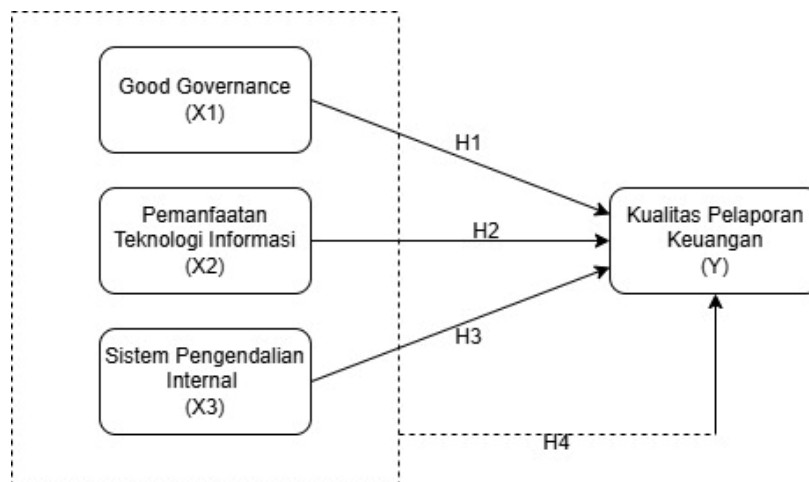
2.2.6.3 Hubungan Kuallitas Laporan Keuangan dengan Stewardship Theory

Stewardship Theory menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki amanah untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, yaitu laporan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan mencerminkan keberhasilan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Model Hipotesis



Sumber: Data diolah peneliti, 2025

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Hubungan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan Stewardship Theory yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991), aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam menjalankan amanah tersebut, aparatur pemerintah dituntut menerapkan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Penerapan *good governance* yang baik akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang mendukung hal tersebut. Mediaty et al. (2025), Drilia et al. (2025), menemukan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, Ayuningtyas et al. (2022) menemukan bahwa *good governance* tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik saja belum tentu cukup apabila tidak didukung faktor lain, seperti kompetensi sumber daya manusia. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan *good governance* dan kualitas laporan keuangan masih perlu diteliti kembali, khususnya pada OPD Kota Malang.

H1: *Good governance* berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4.2 Hubungan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* berpotensi menimbulkan asimetri informasi. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu mekanisme untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut melalui penyediaan informasi keuangan yang lebih cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, pemerintah dapat menyusun laporan keuangan secara lebih efektif dan andal sehingga kualitas laporan keuangan dapat meningkat.

Penelitian Widiyasalwa et al. (2024), Mediaty et al. (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, Yamin & Lawaidjo (2025) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan. Hal ini dapat terjadi apabila teknologi yang tersedia belum dimanfaatkan secara optimal atau belum didukung kemampuan pengguna yang memadai. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan masih perlu diuji kembali pada OPD Kota Malang.

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan.

2.43 Hubungan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

Dalam Agency Theory, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memastikan bahwa pemerintah sebagai agen

menjalankan tugasnya sesuai aturan. Sistem pengendalian yang baik dapat mencegah kesalahan, kecurangan, dan penyimpangan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jika pengendalian internal diterapkan secara efektif, maka setiap transaksi akan dicatat dengan benar dan sesuai prosedur. Hal ini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya.

Fiqih et al. (2024) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, Widiyasalwa et al. (2024) serta Akbar & Choiriah (2025) menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem pengendalian saja tidak cukup jika pelaksanaannya belum optimal.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan masih perlu diuji kembali pada OPD Kota Malang.

H3: Sistem pengendalian internal berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4.4 Hubungan *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan Agency Theory, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh adanya mekanisme pengawasan yang mampu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agent dan masyarakat sebagai principal. Sementara itu, Stewardship Theory menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena

itu, penerapan good governance, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian (Drilia et al., 2025) menunjukkan bahwa *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Widiasalwa et al., 2024) yang menyatakan bahwa kombinasi sistem informasi dan pengendalian internal mampu menjelaskan variasi kualitas laporan keuangan secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Malang.

H4: *Good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kuantitatif merupakan metode yang menggunakan data dan angka, atau data yang kemudian dapat diberikan skor untuk diukur dan analisis lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada pegawai Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada masing-masing OPD yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Malang yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemilihan lokasi penelitian dilakukan untuk memastikan kemudahan dalam menentukan subjek atau unit analisis yang relevan dengan tujuan penelitian, dan mencakup Badan serta Dinas di Kota Malang.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2022), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Malang yang memiliki unit Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang terlibat dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah.

3.3.2 Sampel

Dalam penelitian ini, sampel dipahami sebagai sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dengan kata lain, sampel tidak mencakup seluruh populasi (Sugiyono, 2022). Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu 24 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memenuhi kriteria penelitian. Dari jumlah tersebut, 23 OPD mengembalikan kuesioner dan menjadi objek penelitian. Sebanyak 136 kuesioner disebarkan, sedangkan 132 kuesioner kembali dan dapat diolah, sehingga jumlah sampel akhir dalam penelitian ini adalah 132 responden.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Responden dipilih karena berada pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di OPD Kota Malang yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan

dan penyusunan laporan keuangan daerah. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Malang.
2. Pegawai yang berada pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di OPD Kota Malang.
3. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun atau telah memiliki pengalaman dalam proses penyusunan laporan keuangan.

3.5 Data dan Jenis Data

Menurut Sugiyono (2022), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian melalui interaksi langsung dengan peneliti. Data primer dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, maupun penyebaran kuesioner, sehingga memiliki tingkat keaslian yang tinggi karena belum melalui proses pengolahan pihak lain.

Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner fisik *door to door* kepada pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang yang menangani pengelolaan dan laporan keuangan. Instrumen kuesioner ini disusun berdasarkan indikator yang mewakili empat variabel utama, yaitu *Good Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan. Setiap indikator diukur menggunakan skala *Likert* lima poin untuk mengetahui tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diajukan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dan strategis dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2022). Tahap ini menjadi inti dari proses penelitian karena kualitas data yang diperoleh akan sangat menentukan tingkat validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2022), pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa metode, di antaranya observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan jenis penelitian, tujuan, serta karakteristik variabel yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kuesioner sebagai metode utama pengumpulan data. Kuesioner merupakan instrumen yang berisi sejumlah pernyataan tertulis yang harus dijawab oleh responden (Sugiyono, 2022). Penggunaan kuesioner dinilai tepat karena penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bertujuan untuk mengukur pengaruh *Good Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas laporan Keuangan.

3.6.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur setiap variabel yang digunakan. Pengukuran nilai variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert yang mengacu pada sebagai berikut:

Tabel 3 1 Jawaban dan Skor dalam Skala Likert

Ukuran Skala Likert	Ukuran Skala
Sangat Setuju (SS)	5

Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.7 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2022), variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi ini menjabarkan setiap indikator variabel dalam bentuk konsep yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel dependen, variabel independen.

3.7.1 Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi kausalitas timbulnya variabel dependen. Variabel ini merupakan variabel yang memberikan stimulus terhadap variabel yang terikat (dependen). Variabel ini merupakan variabel yang dikontrol oleh peneliti untuk melihat pengaruh nya terhadap variabel dependen. Variabel independen sering disebut sebagai variabel X.

3.7.1.1 *Good Governance* (X1)

Good Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya publik. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung

jawab. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, *good governance* berperan penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan laporan keuangan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penerapan tata kelola yang baik diharapkan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.7.1.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem informasi dalam mendukung proses pengelolaan keuangan daerah. Teknologi informasi memungkinkan proses pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi keuangan dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dapat meminimalkan kesalahan pencatatan, meningkatkan ketepatan waktu laporan, serta mendukung transparansi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

3.7.1.3 Sistem Pengendalian Internal (X3)

Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, khususnya dalam hal keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam sektor publik, sistem pengendalian internal berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan, penyimpangan, maupun kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan pengendalian internal

yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.7.2 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Dengan kata lain, variabel ini menunjukkan hasil atau respon yang timbul karena adanya pengaruh dari variabel bebas. Variabel ini merupakan variabel yang diukur atau diamati untuk melihat pengaruh dari variabel independen. Dalam penelitian, variabel dependen sering disebut sebagai variabel Y.

3.7.2.1 Kualitas laporan Keuangan (Y)

Kualitas laporan keuangan merupakan tingkat kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang berkualitas mampu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya serta mendukung proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks pemerintah daerah, kualitas laporan keuangan menunjukkan sejauh mana laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, disajikan secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Semakin baik penerapan tata kelola, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal, maka diharapkan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Tabel 3 2 Definisi Operasional Variabel, Indikator, dan Item Pertanyaan

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1	<i>Good Governance</i> (Mediaty et al., 2025)	Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan.	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Partisipasi 4. Efektivitas dan Efisiensi 5. Kepatuhan terhadap Peraturan	Ordinal
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi (Mediaty et al., 2025)	Tingkat penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.	1. Proses kerja secara elektronik 2. Pengolahan dan penyimpanan data keuangan 3. Pengolahan informasi dengan jaringan internet 4. Sistem manajemen 5. Perawatan dan pemeliharaan perangkat komputer	Ordinal
3	Sistem Pengendalian	Proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas efektivitas operasional,	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian	Ordinal

	Internal (Mediaty et al., 2025)	keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan.	Risiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan	
4	Kualitas Pelaporan Keuangan (Mediaty et al., 2025)	Tingkat kemampuan laporan keuangan pemerintah daerah dalam menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai SAP.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami	Ordinal

3.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiyono (2021), analisis data dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bermakna melalui proses statistik. Pada tahap analisis data menggunakan SPSS *statistic* Versi 4. teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut:

3.8.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah pertanyaan tersebut valid atau tidak berdasarkan butir-butir dari pertanyaan kuesioner yang sudah dibuat. Untuk menentukan signifikan atau tidak signifikannya yaitu dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel $df (n - k)$ dengan nilai signifikansi $\alpha 0.05$. Apabila nilai r hitung $> r$ tabel maka butir pernyataan

tersebut dianggap valid. Berikut hasil uji validitas instrumen yang telah dilakukan. Jumlah sampel yang digunakan dalam uji validitas ini adalah 20 responden, sehingga nilai r tabel yang menjadi acuan adalah 0,4438. Item kuisioner dianggap tidak valid jika r hitung kurang dari 0,4438, dan sebaliknya dianggap valid apabila r hitung lebih besar dari 0,4438. Hasil pengujian validitas untuk variabel X1 (Good Governance) ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Uji Validitas *Good governance* (X1)

Item	r Hitung	r Tabel (n=20, $\alpha=0,05$)	Keterangan
X1.1	0,736	0,4438	Valid
X1.2	0,687	0,4438	Valid
X1.3	0,645	0,4438	Valid
X1.4	0,584	0,4438	Valid
X1.5	0,758	0,4438	Valid
X1.6	0,769	0,4438	Valid

Sumber: Data diolah SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh indikator pada variabel Good Governance (X1) dinyatakan valid karena memiliki nilai korelasi item-total yang lebih besar dari r tabel sebesar 0,4483 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan layak digunakan dan dapat dilanjutkan dengan uji reabilitas.

Tabel 3 4 Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Item	r Hitung	r Tabel (n=20, $\alpha=0,05$)	Keterangan

X2.1	0,749	0,4438	Valid
X2.2	0,876	0,4438	Valid
X2.3	0,772	0,4438	Valid
X2.4	0,857	0,4438	Valid

Sumber: Data diolah SPSS (2026)

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh indikator pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) dinyatakan valid, karena memiliki nilai korelasi item-total yang lebih besar dari r tabel sebesar 0,4438 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan layak digunakan dan dapat dilanjutkan dengan uji reabilitas.

Tabel 3 5 Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X3)

Item	r Hitung	r Tabel (n=20, $\alpha=0,05$)	Keterangan
X3.1	0,746	0,4438	Valid
X3.2	0,882	0,4438	Valid
X3.3	0,719	0,4438	Valid
X3.4	0,767	0,4438	Valid
X3.5	0,809	0,4438	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh indikator pada variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) dinyatakan valid, karena memiliki nilai korelasi item-total yang lebih besar dari r tabel sebesar 0,4438 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan layak digunakan dan dapat dilanjutkan dengan uji reabilitas.

Tabel 3 6 Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Item	r Hitung	r Tabel (n=20, $\alpha=0,05$)	Keterangan
Y1	0.890	0,4438	Valid
Y2	0,497	0,4438	Valid
Y3	0,694	0,4438	Valid
Y4	0,626	0,4438	Valid
Y5	0,543	0,4438	Valid
Y6	0,927	0,4438	Valid

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh indikator pada variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) dinyatakan valid, karena memiliki nilai korelasi item-total yang lebih besar dari r tabel sebesar 0,4438 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Dengan demikian, seluruh item pernyataan layak digunakan dan dapat dilanjutkan dengan uji reliabilitas.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur, apakah hasil tersebut tetap konsisten atau tidak jika pengukuran tersebut dilakukan secara berulang. Menurut Sekaran (1992) dalam buku Priyatno (2016), apabila nilai alpha kurang dari 0,6 maka reliabilitas kurang baik, sedangkan nilai alpha 0,7 reliabilitas tersebut dapat diterima. Sedangkan nilai alpha lebih dari 0,8 maka reliabilitas tersebut konsisten secara internal dan memiliki reliabilitas yang kuat

Tabel 3 .7 Hasil Uji Reabilitas Data

Variabel	Cronbach'Alpha	Keterangan
X1	0,787	Reliabel
X2	0,827	Reliabel
X3	0,841	Reliabel
Y	0,788	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel dinyatakan reliabel, karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari nilai minimal Cronbach Alpha yaitu 0,60. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel Good Governance (X1) memiliki nilai Cronbach Alpha sebesar 0,787, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) sebesar 0,827, variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) sebesar 0,841, dan variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) sebesar 0,788. Dengan demikian, keempat variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel dan instrumen kuisioner dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian lebih lanjut.

3.8.3 Uji Asumsi

Uji Asumsi digunakan untuk mengetahui apakah analisis yang digunakan sudah memenuhi prasyarat atau asumsi yang berlaku atau tidak. Uji asumsi yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

3.8.3.1 Uji normalitas data

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data terdistribusi dengan normal atau tidak. Analisis parametrik seperti korelasi Pearson mensyaratkan bahwa data harus terdistribusi dengan normal. Pengujian

dilakukan dengan metode Normal Probability Plots yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, nilai regresi residual terdistribusi dengan normal atau tidak.

3.8.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah multikolinearitas. Metode pengambilan keputusan yaitu jika Tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas

3.8.3.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2016), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menilai apakah varians residual dalam model regresi bersifat seragam di seluruh pengamatan. Jika varians residual sama antar pengamatan, kondisi ini disebut homoskedastisitas, sedangkan jika varians residual berbeda-beda antar pengamatan, disebut heteroskedastisitas. Salah satu metode yang umum digunakan untuk menguji heteroskedastisitas adalah Glejser Test. Keputusan pengujian dilakukan berdasarkan tingkat signifikansi: jika nilai signifikansi lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas; sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka model menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas.

3.8.4 Analisis regresi linear berganda

Regresi linear berganda adalah memperkirakan besarnya koefisienkoefisien yang dihasilkan dari persamaan yang bersifat linear.

Persamaan tersebut melibatkan dua variabel bebas untuk digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel yang bergantung. Regresi linear berganda Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini rumus yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel kualitas laporan keuangan

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

X1 = Variabel *good governance*

X2 = Variabel pemanfaatan teknologi informasi

X3 = Variabel sistem pengendalian internal

e = Standart error

3.8.4.1 Uji F

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Berikut adalah langkah-langkah untuk menguji hipotesa dengan distribusi uji F:

1. Merumuskan Hipotesis

- a. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, berarti secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

b. H_a : apabila minimal terdapat satu $\beta \neq 0$ maka terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Menentukan tingkat signifikansi Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3. Melakukan statistik uji, yaitu: menentukan F hitung dan menentukan F tabel Setelah menentukan taraf nyata atau derajat keyakinan yang digunakan, maka bisa menentukan nilai t tabel. Dengan derajat bebas (df) dalam distribusi F ada dua, yaitu:

a. $df_{\text{numerator}} = df_n = df_1 = k - 1$

b. $df_{\text{denominator}} = df_d = df_2 = n - k$

Keterangan: df: degree of freedom/ derajat kebebasan

n: Jumlah sampel

k : banyaknya koefisien regresi

4. Kriteria pengujian dengan menentukan daerah kritis apabila H_0 diterima bila F hitung $< F$ tabel, dan H_0 ditolak bila F hitung $> F$ tabel

5. Membandingkan F hitung dengan F tabel

3.8.4.2 Uji T

Uji statistik T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Berikut adalah langkah-langkah untuk menguji

hipotesa dengan distribusi uji T:

1. Merumuskan hipotesa

$H_0 : \beta_i = 0$, artinya variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

$H_a : \beta_i \neq 0$, artinya variabel bebas merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

a. Hipotesa nol = H_0

H_0 adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. H_0 merupakan hipotesis statistik yang akan diuji hipotesis nihil.

b. Hipotesa alternatif = H_a

H_a adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesa nol adalah salah.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian).

3. Melakukan statistik uji, yaitu: menentukan T hitung dan Menentukan T tabel setelah menentukan taraf nyata atau derajat keyakinan yang digunakan sebesar setelah menentukan taraf nyata atau derajat keyakinan yang digunakan sebesar $\alpha = 1\%$ atau 5% atau 10%, maka bisa menentukan nilai t tabel pada persamaan 2.5 yaitu: $df = n - k$

Keterangan:

Df : Degree of freedom atau derajat

kebebasan n : Jumlah sampel

k : Banyaknya koefisien regresi + konstanta

4. Kriteria Pengujian dengan menentukan daerah kritis H_0 diterima jika $-T_{\text{tabel}} < T_{\text{hitung}} < T_{\text{tabel}}$ dan H_0 ditolak jika $-T_{\text{hitung}} < -T_{\text{tabel}}$ atau $T_{\text{hitung}} > T_{\text{tabel}}$
5. Membandingkan T_{hitung} dengan T_{tabel}

3.8.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat pada suatu model penelitian. Nilai R^2 berada antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin besar pengaruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Sebaliknya, jika mendekati 0, berarti pengaruhnya kecil. Jadi, R^2 digunakan untuk melihat seberapa baik model regresi dalam menjelaskan data penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuisisioner secara langsung kepada responden pada berbagai instansi di Kota Malang. Proses distribusi dan pengumpulan data dilakukan selama 1 bulan, mulai tanggal 19 Mei 2026. Dari total 24 instansi yang dijadikan sampel, terdiri dari 1 Inspektorat, 1 Satpol PP, 5 badan, 5 kecamatan, dan 11 dinas, terdapat 1 dinas yang tidak mengembalikan kuisisioner karena melewati batas waktu yang telah ditentukan peneliti. Secara keseluruhan, kuisisioner yang diterima kembali berjumlah 23 instansi.

Tabel 4 1 Karakteristik Responden

No.	Nama Instansi	Jumlah Kuisisioner yang Dibagikan	Jumlah Kuisisioner yang Dikembalikan	Jumlah Kuisisioner yang Diolah	Jumlah Kuisisioner yang tidak kembali
1	Inspektorat	3	3	3	0
2	Satpol PP	5	5	5	0
3	Kec. Klojen	5	5	5	0
4	Kec. Lowokwaru	4	4	4	0
5	Kec. Kedungkandang	2	2	2	0
6	Kec. Sukun	4	4	4	0

7	Kec. Blimbing	3	3	3	0
8	BKAD	25	24	24	1
9	Bappeda	2	2	2	0
10	Bapenda	5	5	5	0
11	Bakesbangpol	6	6	6	0
12	BKPSDM	5	3	3	2
13	Disnaker	5	5	5	0
14	Dinas Kominfo	3	3	3	0
15	Dispendikbud	15	15	15	0
16	Dishub	3	3	3	0
17	DPUPRKP	6	6	6	0
18	Diskopindag	9	9	9	0
19	Disporapar	5	5	5	0
20	Dispendukcakil	6	5	5	1
21	Dinas lingkungan hidup	5	5	5	0
22	Dinas peprpustakaan	4	4	4	0
23	Dinsos	4	4	4	0

Sumber: Data primer diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa kuesioner yang diisear sebanyak 136 tetapi hanya 132 kuesioner yang dapat dijadikan sebagai data dalam penelitian ini. Tingkat pengembalian kuesioner sebesar 97%, hal ini dikarenakan 4 kuesioner tidak kembali sehingga tidak dapat dijadikan sebagai data penelitian. Tingkat kuesioner yang tidak kembali sebesar 3%.

4.1.1.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pegawai Pemerintah Daerah Kota Malang, karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin Responden

Pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4 2 Deskripsi Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	53	40%
2	Perempuan	79	60%
	Jumlah	132	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan dibandingkan laki-laki, yaitu perempuan sebanyak 79 responden dengan tingkat persentase 60%, sedangkan laki-laki sebanyak 53 responden dengan tingkat persentase 40% dari jumlah keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi responden perempuan lebih dominan dalam Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan OPD Kota Malang.

b. Lama Bekerja

Informasi mengenai karakteristik responden menurut lama bekerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 3 Deskripsi Lama Bekerja Responden

No.	Frekuensi	Jumlah	Presentase
1	1-3 Tahun	41	31%

2	4-6 Tahun	23	17%
3	>6 Tahun	68	52%
	Jumlah	132	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini telah bekerja lebih dari 6 tahun, yakni sebanyak 68 responden dengan persentase 52%. Responden yang memiliki lama bekerja 1-3 tahun berjumlah 41 orang (31%), sedangkan yang memiliki lama bekerja 4-6 tahun sebanyak 23 orang (17%) dari total 132 responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengalaman kerja yang cukup lama dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan daerah.

4.1.2 Analisis Data

4.1.2.1 Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini, variabel yang diuji meliputi *Good Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan. Variabel-variabel tersebut dianalisis secara statistik deskriptif menggunakan SPSS untuk memperoleh nilai rata-rata (mean), standar deviasi (SD), nilai minimum, dan nilai maksimum. Hasil dari statistik deskriptif responden OPD Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 4 4 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Good Governance (X1)	132	9	30	24,88	4,489

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	132	5	20	16,86	2,991
Sistem Pengendalian Internal (X3)	132	7	25	20,85	3,873
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	132	10	30	25,60	3,965
Valid N (listwise)	132				

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)

Jumlah data observasi (n) yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 132 responden. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) memperoleh nilai rata-rata sebesar 25,60 dengan nilai minimum 10, nilai maksimum 30, dan standar deviasi sebesar 3,965. Variabel Good Governance (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 24,88 dengan nilai minimum 9, nilai maksimum 30, dan standar deviasi sebesar 4,489. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 16,86 dengan nilai minimum 5, nilai maksimum 20, dan standar deviasi sebesar 2,991. Sementara itu, variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 20,85 dengan nilai minimum 7, nilai maksimum 25, dan standar deviasi sebesar 3,873.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah residual dari model regresi berdistribusi secara normal. Menurut Ghozali (2016), jika residual tidak

berdistribusi normal, maka hasil uji statistik dapat menjadi kurang akurat dan berpotensi menurunkan keandalan analisis. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S). Keputusan pengujian ditentukan sebagai berikut: apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) lebih besar dari 0,05, data residual dianggap berdistribusi normal; sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, data residual dianggap tidak normal. Hasil pengujian normalitas penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4 5 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorv-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		132
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.75428658
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.037
	Negative	-.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)

Berdasarkan tabel diatas 4.5 diketahui Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

4.1.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa apakah variabel bebas (independen) dalam model regresi saling berkorelasi terlalu tinggi. Hal ini penting karena jika terdapat multikolinearitas, hasil estimasi koefisien regresi bisa menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan.

Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas dilakukan menggunakan nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Variabel independen dianggap tidak mengalami multikolinearitas jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Sebaliknya, jika $Tolerance < 0,1$ atau $VIF > 10$, terdapat indikasi multikolinearitas yang dapat memengaruhi keakuratan analisis regresi. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Good Governance	0.993	1.007
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.912	1.096

	Sistem Pengendalian Internal	0.909	1.100
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan			

Sumber: Data diolah SPSS (2026)

Berdasarkan tabel diatas 4.6 diketahui hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel Good Governance memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,993 dan VIF sebesar 1,007. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,912 dan VIF sebesar 1,096. Variabel Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,909 dan VIF sebesar 1,100. Seluruh nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan seluruh nilai VIF lebih kecil dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Artinya, Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat satu sama lain, sehingga ketiganya dapat digunakan secara bersama-sama untuk memprediksi Kualitas Laporan Keuangan.

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat kesamaan pada semua variable penelitian dalam model regresi. Penelitian ini menggunakan Gletjer Test untuk menguji heteroskedastisitas. Berikut ini hasil pengujian heteroskedastisitas:

Tabel 4 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficientsa				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.831	1.281		2.991	.003
	Good Governance	-.018	.033	-.047	-.540	.590
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.003	.052	.005	.052	.959
	Sistem Pengendalian Internal	-.061	.041	-.139	-1.513	.133
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan						

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)

Berdasarkan tabel diatas 4.7 diketahui hasil uji heterokedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan bahwa variabel Good Governance memiliki nilai signifikansi sebesar 0,590, variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,959, dan variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,133. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi sehingga telah memenuhi aasumsi homokedastisitas.

4.1.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, yang bertujuan untuk menelusuri hubungan antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan maupun parsial dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi linear berganda dalam penelitian ini juga digunakan untuk mengujikan

hipotesis yang telah dirumuskan, yaitu H1, H2, H3, dan H4. Berikut ini disajikan hasil dari pengujian regresi linear berganda pada penelitian ini.

Tabel 4 8 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.964	2.083		0.943	0.348
	Good Governance	0.377	0.054	0.427	6.935	0.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.289	0.085	0.218	3.391	0.001
	Sistem Pengendalian Internal	0.450	0.066	0.439	6.820	0.000
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan						

Sumber: Data diolah SPSS, (2026)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan regresi linear berganda yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 1.964 + 0,377 + 0,289 + 0,450 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 1,964 menunjukkan bahwa jika variabel Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal bernilai nol, maka nilai Kualitas Laporan Keuangan diprediksi sebesar 1,964.
2. Koefisien regresi Good Governance 0,377 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Good Governance akan meningkatkan Kualitas

Laporan Keuangan sebesar 0,377, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

3. Koefisien regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,289 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,289, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
4. Koefisien regresi Sistem Pengendalian Internal 0,450 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Sistem Pengendalian Internal akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,450, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

4.1.4 Uji T (Uji Parsial)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh signifikan secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen, yaitu Kualitas Laporan Keuangan. Uji ini menggunakan t-test, dengan kriteria pengambilan keputusan:

1. Jika nilai signifikansi (p-value) $< 0,05$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel} \rightarrow$ variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi (p-value) $\geq 0,05$ atau $t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel} \rightarrow$ variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Nilai t tabel ditentukan dari jumlah sampel 132 dan jumlah variabel independen 3, dengan taraf signifikansi 5% (uji dua sisi), berikut adalah rumus untuk mencari t-tabel :

$$t\text{-tabel} = (a/2 : n-k-1)$$

$$t\text{-tabel} = (0,05/2 : 132-3-1)$$

$$t\text{-tabel} = (0,025 : 128)$$

$$t\text{-tabel} = 1,980$$

Maka dapat dilihat dari perhitungan t-tabel diatas dalam penelitian ini dengan nilai 1,980

Tabel 4 9 Hasil Uji t (Uji Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.964	2.083		0.943	0.348
	Good Governance	0.377	0.054	0.427	6.935	0.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.289	0.085	0.218	3.391	0.001
	Sistem Pengendalian Internal	0.450	0.066	0.439	6.820	0.000
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan						

Sumber: data diolah SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dapat direpresentasikan sebagai berikut:

1. Uji hipotesis variabel Good Governance (H1) memiliki nilai signifikansi 0,000 (< 0,05) atau t hitung 6,935 (> t tabel 1,980), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial positif dan signifikan antara variabel Good Governance terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).

2. Uji hipotesis variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (H2) memiliki nilai signifikansi 0,001 ($< 0,05$) atau t hitung 3,391 ($> t$ tabel 1,980), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial positif dan signifikan antara variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).
3. Uji hipotesis variabel Sistem Pengendalian Internal (H3) memiliki nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$) atau t hitung 6,820 ($> t$ tabel 1,980), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh parsial positif dan signifikan antara variabel Sistem Pengendalian Internal terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).

4.1.5 Uji Simultan (Uji – f)

Secara simultan, pengujian dilakukan menggunakan uji F. Uji statistik F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Kualitas Laporan Keuangan. Dasar pengambilan keputusan pada uji simultan ini yaitu:

1. Jika nilai signifikansi (sig) $< 0,05$ atau F hitung $> F$ tabel $\rightarrow$ terdapat pengaruh variabel X terhadap Y secara simultan.
2. Jika nilai signifikansi (sig) $\geq 0,05$ atau F hitung $\leq F$ tabel $\rightarrow$ tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y secara simultan.

Berdasarkan dasar pengambilan keputusan diatas, maka dapat ditentukan nilai F tabel dari jumlah sampel 132 dan dengan 3 variabel independen.

Berikut ini adalah rumus dan perhitungan F tabel dalam uji simultan:

$$F\text{-tabel} = f(k:n - k-1)$$

$$F\text{-tabel} = f(3;132 - 3 - 1)$$

$$F\text{-tabel} = f(3;128)$$

$$F\text{-tabel} = 2,68$$

Tabel 4 10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1065.941	3	355.314	45.765	.000 ^b
	Residual	993.778	128	7.764		
	Total	2059.720	132			
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan						
b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi						

Sumber: data diolah SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 45,765 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Berdasarkan jumlah responden sebanyak 132 dan jumlah variabel independen sebanyak 3, maka diperoleh df1 sebesar 3 dan df2 sebesar 128. Pada taraf signifikansi 0,05, nilai F tabel sekitar 2,68. Nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu $45,765 > 2,68$, dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya, model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan pengaruh ketiga variabel independen terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.1.6 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, dimana nilai yang rendah menunjukkan bahwa variabel bebas memberikan sedikit informasi dalam menjelaskan variabel terikat, sedangkan nilai yang mendekati 1 menandakan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan hampir seluruh variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang diukur adalah Kualitas Laporan Keuangan, sehingga koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gabungan Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berikut hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini:

Tabel 4 11 Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.719 ^a	0.518	0.506	2.786
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi				
b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan				

Sumber: data diolah SPSS (2026)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi, nilai R^2 sebesar 0,518 menunjukkan bahwa 51,8% variasi Kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan secara bersama-sama oleh variabel independen yaitu Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan

Sistem Pengendalian Internal. Sementara sisanya, sebesar 48,2%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi linear berganda yang digunakan cukup kuat untuk menjelaskan pengaruh ketiga variabel independen terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD Kota Malang, meskipun masih ada variabel lain yang turut memengaruhi kualitas laporan keuangan yang tidak termasuk dalam penelitian.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,377, nilai *t* hitung sebesar 6,935 yang lebih besar dari *t* tabel 1,980, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip *good governance*, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh OPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Stewardship Theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991). Teori ini menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan organisasi dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Dalam konteks pemerintahan daerah, aparatur pemerintah diberikan amanah untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Amanah tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance*, sehingga

setiap proses pengelolaan keuangan dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik..

Penerapan *good governance* melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsibilitas, dan independensi berperan penting dalam mengurangi kesenjangan informasi tersebut. Dengan tata kelola yang baik, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami (Andika et al., 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan OPD dalam menerapkan mekanisme tata kelola yang baik mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan kepada publik. Sejalan dengan studi dari (Safkaur et al., 2019) penerapan basis akrual dalam pelaporan keuangan berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan yang baik yang dihasilkan dari pelaporan keuangan, selain itu hasil ini mengindikasikan bahwa tata kelola yang kredibel berperan vital dalam penyajian laporan keuangan yang lebih bermutu. Selaras dengan Putri et al., (2024), tata kelola yang baik menjamin pengambilan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Temuan ini juga memberikan dukungan empiris terhadap penelitian Rafdiansyah & Ronaboyd, (2025) yang menyatakan bahwa penguatan prinsip *Good Governance* di instansi pemerintah akan berdampak pada meningkatnya akurasi informasi keuangan.

Semakin kuat implementasi *good governance*, semakin kecil peluang terjadinya penyimpangan pelaporan keuangan dan semakin besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan studi dari Megasyara & Imawan, (2023) Penerapan prinsip tata kelola yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut membantu meminimalkan potensi penyimpangan serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih andal dan berkualitas.

Good governance merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik. Menurut (B. I. Putri et al., 2025) Penerapan prinsip *good governance* memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik. Penelitian (Nurhidayat, 2023) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, efisiensi, responsivitas, dan keadilan, berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten mendorong terciptanya laporan keuangan yang lebih andal, tepat waktu, relevan, dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan.

Salah satu bentuk nyata penerapan *good governance* adalah meningkatnya transparansi dalam pengelolaan dan penyajian informasi keuangan. Keterbukaan akses terhadap informasi keuangan memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk melakukan pengawasan secara lebih optimal, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat semakin ditingkatkan. Kondisi ini

pada akhirnya mendukung terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang lebih kredibel dan dapat dipercaya.

Peningkatan kualitas tersebut terjadi karena adanya dorongan bagi aparaturnya pemerintah untuk melaksanakan tugas secara transparan dan bertanggung jawab, disertai pemahaman yang baik mengenai peran dan tanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan. Lebih lanjut, (Indri Kartika et al., 2026) menjelaskan bahwa implementasi good governance dapat mengurangi agency cost, meningkatkan kinerja organisasi, serta memperkuat citra institusi pemerintah. Melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan integritas, potensi penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya publik dapat diminimalkan sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, tata kelola yang terbuka dan partisipatif juga mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan publik.

Pada akhirnya, penerapan good governance tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, penguatan legitimasi pemerintah, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, good governance menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

4.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Malang. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,289, nilai t hitung sebesar 3,391 yang lebih besar dari t tabel 1,980, serta nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Menurut Agency Theory, salah satu permasalahan utama dalam hubungan antara agen dan prinsipal adalah keterbatasan akses informasi yang dimiliki prinsipal. Hal ini dijelaskan oleh Heriyah, (2026) Kondisi tersebut dapat memunculkan agency costs yang terdiri atas monitoring cost, bonding cost, dan residual loss dimana pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu mengurangi biaya-biaya keagenan tersebut melalui penyediaan informasi keuangan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi sarana untuk mengurangi masalah tersebut melalui penyediaan informasi yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Sistem informasi keuangan yang terintegrasi memungkinkan pengolahan data keuangan dilakukan secara real-time sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan manipulasi data. Hal ini selaras dengan penelitian dari (Asri et al., 2024) istem berbasis teknologi ini menyediakan informasi keuangan secara real-time melalui cloud, otomatisasi, dan analisis data, yang meningkatkan efisiensi pengelolaan, transparansi, serta akuntabilitas tata kelola keuangan sekolah. Sedangkan (Asri et al., 2024) Digitalisasi mendukung terciptanya pengelolaan keuangan yang efisien, transparan,

dan akuntabel, sekaligus meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa transformasi digital dalam sektor publik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas informasi keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Studi peningkatan pelatihan berkelanjutan, optimalisasi aplikasi keuangan, dan penguatan pengawasan internal sangat penting untuk meningkatkan kualitas LKPD. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi yang memadai mampu meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Malang. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,450, nilai t hitung sebesar 6,820 yang lebih besar dari t tabel 1,980, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai koefisien terbesar dibandingkan variabel independen lainnya, yang menunjukkan bahwa faktor ini memberikan kontribusi paling dominan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Dalam kerangka Agency Theory, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dirancang untuk memastikan bahwa agen melaksanakan tugas

dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan organisasi serta kepentingan prinsipal (Asmara et al., 2026). Pengendalian internal yang efektif dapat meminimalkan risiko kesalahan, kecurangan, penyalahgunaan aset, maupun praktik oportunistik yang berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan (Sasmita et al., 2026).

Penerapan unsur-unsur pengendalian internal seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan memungkinkan setiap transaksi keuangan tercatat secara benar dan terdokumentasi dengan baik (Tjun et al., 2026). Kondisi tersebut menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang kuat, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah juga dapat meningkat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu (Sari et al., 2026) yang menyatakan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal merupakan salah satu determinan utama kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu, penelitian (Haerani et al., 2026) menemukan bahwa efektivitas pengendalian internal dan peran audit internal, baik secara parsial maupun simultan, berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dan audit internal memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin baik pengendalian internal yang diterapkan, semakin tinggi pula kualitas informasi keuangan yang dihasilkan.

4.2.2 Pengaruh *Good Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Malang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 45,765 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,68 serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,518 menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan 51,8% variasi kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 48,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui Agency Theory dan Stewardship Theory. Berdasarkan Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), penerapan *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal merupakan mekanisme yang dapat mengurangi asimetri informasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Stewardship Theory yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991) menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan masyarakat melalui penerapan tata kelola yang baik, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, dan sistem pengendalian internal yang efektif. Oleh karena itu, sinergi ketiga faktor tersebut mampu mendukung terwujudnya laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil dari mekanisme pengelolaan dan pengawasan yang mampu mengurangi konflik kepentingan serta asimetri informasi antara agen dan prinsipal (Ridhasyah & Andanawarih, 2026). Good governance berfungsi sebagai landasan tata kelola yang menekankan akuntabilitas dan transparansi. Menurut (Wahyudi et al., 2026) penguatan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat penting untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang bersih di Indonesia. Selain tata kelola pemanfaatan teknologi informasi mendukung penyediaan informasi yang cepat dan akurat. Menurut Caniago & Maulina, (2026) tinjauan literatur yang dilakukan menyebutkan pentingnya penguatan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan kebijakan pengamanan data yang komprehensif sebagai strategi optimalisasi implementasi teknologi informasi dalam tata kelola keuangan publik yang berkelanjutan. Sementara itu, sistem pengendalian internal memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prosedur dan terhindar dari kesalahan maupun penyimpangan (Sulastri, 2026). Ketiga faktor tersebut saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak dapat dicapai hanya melalui satu aspek saja, melainkan memerlukan sinergi antara tata kelola yang baik, dukungan teknologi informasi yang memadai, dan sistem pengendalian internal yang kuat. Ketika ketiga faktor tersebut berjalan secara optimal, OPD mampu menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sektor publik, yaitu relevan,

andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Studi terdahulu dari (Kurniadi et al., 2026) pengaruh positif dan signifikan dari implementasi SAP, Tata Kelola yang Baik, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, baik secara parsial maupun simultan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperkuat implementasi good governance, memperluas pemanfaatan teknologi informasi, serta meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Malang, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $6,935 > 1,980$.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Malang, dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $3,391 > 1,980$.
- c. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Malang, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $6,820 > 1,980$.
- d. Good Governance, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada OPD Kota Malang, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $45,765 > 2,68$. Ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan kualitas laporan keuangan sebesar 51,8%, sedangkan sisanya 48,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang. Semakin baik penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal mampu mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat, cepat, dan andal.
- c. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan keandalan dan kualitas informasi keuangan yang disajikan.
- d. Good Governance, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang. Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan dapat dicapai melalui penguatan ketiga aspek tersebut secara terpadu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh good governance, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang, diperoleh beberapa temuan penting yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan maupun penelitian selanjutnya. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, baik secara parsial maupun simultan. Dengan demikian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah/OPD Kota Malang

Pemerintah daerah melalui masing-masing OPD disarankan untuk terus memperkuat penerapan prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah. Penerapan tata kelola yang baik perlu dilakukan secara konsisten agar proses penyusunan laporan keuangan dapat berjalan lebih terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi perlu dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sistem informasi keuangan daerah serta peningkatan kompetensi aparatur dalam mengoperasikan sistem tersebut. Penggunaan teknologi yang terintegrasi akan membantu mempercepat proses pencatatan, meningkatkan akurasi data, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Di sisi lain, sistem pengendalian internal juga perlu diperkuat, terutama dalam aspek pengawasan, pemisahan fungsi, serta evaluasi berkala terhadap proses pengelolaan keuangan. Penguatan sistem ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, sehingga kualitas laporan keuangan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, budaya organisasi, maupun sistem akuntansi pemerintah yang lebih spesifik. Selain itu, penelitian dapat diperluas pada objek yang berbeda atau cakupan wilayah yang lebih luas agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasikan secara lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiuddin, L., & Aminah. (2025). Systematic Literature Review: The Role Of Information Technology In Improving The Efficiency Of Government Financial Management In Indonesia. 6, 2566–2583.
- Akbar, A., & Choiriah, S. (2025). The Effect Of Good Corporate Governance, Internal Control System, And Human Resource Competence On Financial Reporting Quality. 0696.
- Andika, A., Kurnianingsih, F., & Firman, F. (2026). Tata Kelola Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan (Studi Kasus Badan Keuangan Aset Dan Daerah).
- Asmara, R. Y., Judijanto, L., Aristhantia, I. T., Suhardi, S., & Hidayat, E. N. (2026). Audit Internal: Konsep Dan Praktik. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Asri, A., Siregar, N. A. N., Liza, S., & Hidayatullah, R. (2024). Pengembangan Sistem Keuangan Sekolah Berbasis Teknologi Untuk Mendukung Transformasi Society 5.0. Ihsan: Jurnal Pendidikan Islam, 2(4), 216–224.
- Atharrizka, N., Nurjanah, Y., & Andrianto, T. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 1(2). <https://doi.org/10.37641/jikes.v1i2.889>
- Auliyana, E. (2017). Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit Wtp Di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jurnal Akuntansi Aktual, 4(1), 22–33.
- Ayem, S., & Amahala, R. (2023). Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta). 12(01), 90–102.
- Ayuningtyas, I., Sulistyawa, A. I., & Nugroho, A. H. D. (2022). Menakar Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Faktor-Faktor Penentunya (Studi Empiris Pada Skpd Di Kota Semarang). 2(1), 45–55.
- Bunaya, M. A.-A. F., Manulang, J. W., Nisa, D. I., & Yusmaniarti, Y. (2026). Pengaruh Informasi Asimetris Terhadap Perilaku Investasi Di Bursa Efek Indonesia. Journal Of Islamic Economics And Finance, 2(3), 461–478.
- Caniago, K. K., & Maulina, I. (2026). Peran Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik: Tinjauan Literatur Sistematis. At-Tathbiqiyah: Journal Of Multidisciplinary Studies, 1(1), 100–116.
- Commission, C. Of S. O. Of The T. (2013). Internal Control—Integrated Framework. Coso.

- Drilia, S. C., Dewi, F. G., & Suhendro, S. (2025). The Impact Of Internal Control , Hr Competence , And Organizational Commitment On Financial Report Quality Regional Government Organization , With It Utilization As A Moderator (Study On Regional Government Organizations In Southern Sumatera). 4(2), 177–188.
- Fiqih, M., Rizki, J., Wahyudi, I., & Olimsar, F. (2024). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (Bpkpd) Provinsi Jambi). 13(05), 1723–1737.
- Gunawan, A. W., & Arifin, T. (2023). Timeliness Of Local Government Financial Reporting: Evidence From Indonesia. 10(2), 179–190.
- Haerani, A., Prihatin, K. S., Razma, A., & Nurajijah, R. (2026). Systematic Literature Review Of Internal Audit Role, Internal Control System And Organizational Commitment In Enhancing Financial Report Quality. Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan, 9(1), 86–110.
- Heriyah, N. (2026). Bab 6 Teori Agensi Dan Kontrak Optimal. Akuntansi Keperilakuan (Behavioral Accounting), 78.
- Hisyam, M., & Habibi, M. L. (2024). Implementasi Perwujudan Good Governance Melalui Penerapan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Pada Bpkad Kota Surabaya. 2(2), 424–436.
- Ilyas, S. Z. (2025). Coso Integrated Framework Analysis As An Internal Control Assessment. 158–169.
- Indri Kartika, S., Kiryanto, S., Erlinda Ramadhani Permata Putri, S. A., & Rita Rosalina, S. A. (2026). Good Corporate Governance: Transformasi Tata Kelola Di Era Digital. Pt. Atha Publishing Globalindo.
- Jannah, M., Haliah, & Nirwana. (2025). Transparency And Accountability In Local Government Financial Reporting: A Systematic Literature Review.
- Kurniadi, V. R., Arnita, V., & Saputra, H. (2026). The Influence Of Government Accounting Standards (Sap) Implementation, Good Governance, And The Use Of Information Technology On The Quality Of Financial Reports At Bpkpad Binjai City. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital, 5(2), 939–946.
- Lestari, N. A. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Di Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. 2(1), 55–61. <https://doi.org/10.32897/Jiim.2023.2.1>.

- Mediaty, Pontoh, G. T., Nagu, N., Hs, R., Anshari, A., Haji, R., & Aziz, A. (2025). Human Competencies: Amplifying Financial Reporting Quality In Indonesian Local Government. (23), 1–21.
- Megasyara, I., & Imawan, A. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 512–528.
- Mirza Masyhur, Hardi Hardi, & Alfiati Silfi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Kota Dumai. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1179–1192.
- Noriwari, M. A., Pasae, Y., & Sirante, Y. (2025). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Seksi Kesmavet Dinas Pertanian Pangan Kelautan Dan Perikanan Papua Tengah. 1(2), 414–420.
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal Education And Government Wiyata*, 1(1), 40–52.
- Nurhikmah, A. H., & Sisdianto, E. (2024). Peran Akuntan Dalam Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Laporan Keuangan Perspektif Etika. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(11).
- Oci, Y., & Al-Ra'zie, Z. H. (2026). Akuntabilitas Pemerintahan Daerah. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Pangestu, A. (2025). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kualiatas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. 2(3), 264–271.
- Perbawa, I. K. S. L. P., & Najicha, F. U. (2022). Tantangan Reformasi Birokrasi Dalam Mewujudkan Good Governance Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Discretie*, 3(3), 170–181.
- Pongsibidang, A. R., & Nugroho, P. I. (2023). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2, 48–65.
- Prawati, L. D., & Murwaningsari, E. (2024). Determinant Factors Of Financial Reporting Quality In Local Government: The Evidence From Public Sector In Indonesia. 11(32), 123–134.
- Purwanti, A. (2022). Implementation Of Good Governance In Local Government Systems In Indonesia.

- Putri, B. I., Astuti, A., & Afianta, A. Y. (2025). Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Good Governance Dalam Akuntansi Sektor Publik. 5(2).
- Putri, D. C. P., Damayanti, W. A., & Lutfianti, A. (2024). Peran Hukum Dalam Menjamin Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan. Media Hukum Indonesia (Mhi), 2(4).
- Putri, E. Y., & Sundari, S. (2025). Studi Kuantitatif Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 6, 299–314. <https://doi.org/10.32815/Ristansi.V6i2.2732>
- Rafdiansyah, M. R., & Ronaboyd, I. (2025). Prinsip Good Governance Dan Akuntabilitas Fiskal: Bukti Empiris Dari Pengelolaan Anggaran Kabupaten Sumenep. Jurnal Usm Law Review, 8(3), 2293–2313.
- Rahma, D. R. Y., & Sugiartono, E. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (2), 138–144.
- Ridhasyah, R., & Andanawarih, P. P. (2026). Analisis Determinan Praktik Perataan Laba Dalam Perspektif Agency Theory. Journal Economic Insights, 5(1), 34–45.
- Rivai, S. M., Saprudin, S., Junus, O., Masjhur, M. A. R., Hippy, M. N., & Polapa, L. (2026). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien), 5(08), 1269–1278.
- Safkaur, O., Afiah, N. N., Poulus, S., & Dahlan, M. (2019). The Effect Of Quality Financial Reporting On Good Governance. International Journal Of Economics And Financial Issues, 9(3), 277.
- Sari, D., Marlina, L., & Sartika, D. (2026). Analisis Efektivitas Audit Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(1), 6748–6765.
- Sasmita, I. G. A. M. I., Kristiantari, I. D. A., & Pertiwi, I. D. A. E. (2026). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Bpr Se-Kecamatan Mengwi. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa, 7(1).
- Sati, D., Irianto, M. F., Anas, D. E. A. F., & Setyowati, S. W. (2024). Determinan Tata Kelola Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Bkad Kota Malang). <https://doi.org/10.29407/Jae.V9i1.22067>

- Sipahutar, S. R., Fadilla, N., Nadapdap, R. H., Nabila, S., & Supraja, G. (2025). The Effect Of Transparency And Accountability On The Quality Of Public Financial Reports. (2), 1–7.
- Siregar, J., Sirait, B. R. L., & Risdayani, E. (2024). Sistem Pengendalian Internal. *At-Tanmiyah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 18–24.
- Siska, E. Y., Safitri, D., Koesoemasari, P., & Amir, M. F. (2025). The Role Of Financial Literacy , Financial Technology Utilization , And Digital Education In Improving Financial Planning Among Indonesian Millennials. 574–582.
- Stirilita, F. A. (N.D.). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
- Sulastri, L. (2026). Akuntabilitas Publik Di Era Digital: Transparansi, Kinerja, Dan Pelayanan Publik. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tabupook, A. A. (2024). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 2395–2407.
- Tjun, L. T., Sirajudin, S., Rahman, F., & Widyanto, E. A. (2026). Akuntansi Keuangan Menengah I (Berbasis Ifrs & Psak). Cv Eureka Media Aksara.
- Wahyudi, A., Nurman, A., Thabrani, T., Syarkawi, S., & Noorhayati, S. M. (2026). Good Governance Dan Manajemen Anti Korupsi. *Al-Qiyadah: Journal Of Contemporary Islamic Management And Leadership*, 1(1), 58–70.
- Widiasalwa, S., Asaari, M., & Zhafiraah, N. R. (2024). Research Of Accounting And Governance Do Accounting Information Systems , Internal Control , It Utilization , And Hr Competence Affect Financial Reports Quality ? 2(1), 24–34.
- Wijayanti, H., & Kartikasarii, L. (2025). Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan: Studi Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi). 9(3), 760–774.
- Wisudanti, T., & Indriastuti, M. (2025). A Conceptual Paper: Exploring The Determinants Of Financial Reporting Quality In Brebes Regency Local Government , Central Java , Indonesia. 02, 733–741.
- Yamin, N. Y., & Lawaidjo, M. R. (2025). Moderation Of Human Resource Competencies In Quality Of Financial Statements: Application Of Government Accounting Standards , Utilization Of Information Technology , And Control Environment. 6798, 1539–1551.

Yuliani, N. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Aksesibilitas Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 24(1).

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Nur Fadila
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 19 November 2003
Alamat : Desa Jasem, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
Telepon : 085796550245
Email : nurfadila1911@gmail.com

Pendidikan Formal

2008-2010 : TK Baitussalam, Mojokerto
2010-2016 : SDI Baitussalam, Mojokerto
2016-2019 : SMP Bhinneka Tunggal Ika, Pasuruan
2019-2022 : SMA Darut Taqwa, Pasuruan

Pendidikan Non Formal

2022-2023 : PKPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2023-2024 : PKPBI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Lampiran 2. Jurnal Bimbingan

19/06/26, 12.08

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 220502110088
Nama : Nur Fadila
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Dosen Pembimbing : Dr. Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS., CSRA., CFA
Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (PADA OPD KOTA MALANG)**

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	15 Desember 2025	Konsultasi judul penelitian dan penegasan topik yang akan diteliti.	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	6 Februari 2026	Penambahan variabel penelitian, penyempurnaan rumusan masalah, serta revisi pada bab 1	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	9 Februari 2026	Revisi penulisan, perbaikan tabel, pembenahan daftar pustaka, serta revisi pada Bab II	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	11 Februari 2026	pembahasan bab I, penguatan latar belakang	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	16 Februari 2026	pemeriksaan instrumen dan operasionalisasi variabel penelitian	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	18 Februari 2026	penyusunan bab III, pembahasan metode dan teknik analisis data	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	23 Februari 2026	pemeriksaan akhir proposal bab I-III, dinyatakan siap seminar proposal	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	5 April 2026	Konsultasi hasil seminar proposal (sempro) dan penyesuaian revisi Bab III sesuai arahan dosen pembimbing.	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
9	20 April 2026	Konsultasi pengolahan data hasil penelitian menggunakan SPSS, termasuk uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian.	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

10	28 April 2026	Bimbingan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) serta perbaikan penyajian hasil uji.	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
11	10 Mei 2026	Konsultasi hasil analisis regresi linear berganda (uji t, uji F, dan koefisien determinasi) serta interpretasi hasil penelitian Bab IV.	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
12	25 Mei 2026	Bimbingan finalisasi Bab IV dan Bab V, termasuk penyempurnaan pembahasan, kesimpulan, saran, dan persiapan ujian akhir	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
13	15 Juni 2026	Konsultasi revisi akhir keseluruhan skripsi, perbaikan format penulisan, penyesuaian sitasi, serta final check sebelum pengajuan ujian skripsi	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Malang, 15 Juni 2026

Dosen Pembimbing



**Dr. Yona Octiani Lestari, SE., M.SA.,
CSRS., CSRA., CFA**

Lampiran 3. Hasil Test Plagiarisme

18/06/26, 14.01

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Nur Fadila
NIM : 220502110088
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : **PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (PADA OPD KOTA MALANG)**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	13%	10%	22%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 18 Juni 2026

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd

Lampiran 4. Kuisioner Penelitian

Bapak/ibu yang saya hormati, Saya mahasiswa akuntansi uin malang yang sedang melakukan penelitian tentang “Pengaruh *Good Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas laporan Keuangan (Pada OPD Kota Malang)” Partisipasi Bapak/Ibu sangat berperan penting dalam keberhasilan penelitian ini. Seluruh data responden hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Terima kasih atas bantuannya, saya ucapkan terimakasih

IDENTITAS RESPONDEN

1-3 Tahun
4-6 Tahun
> 6 Tahun Nama :

Jenis Kelamin :

Lama Bekerja :

☐
☐
☐

Nama Instansi :

Jabatan/Posisi :

PETUNJUK PENGISIAN

Berdasar atas pengalaman Bapak/Ibu, berilah tanda centang (√) pada salah satu pilihan alternatif jawaban pada kolom yang telah disediakan. Untuk jawaban STS (Sangat tidak setuju) bobot nilainya adalah 1, jawaban TS (tidak setuju)) bobot nilainya adalah 2, jawaban N (Netral) bobot nilainya adalah 3, jawaban S (Setuju)

Bobot nilainya adalah 4, dan jawaban SS (Sangat Setuju) bobot nilainya adalah 5.

Seluruh jawaban responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN				
		ALTERNATIF				
		STS	TS	N	S	SS
Good Governance						
1	Saya memahami tugas dan tanggung jawab saya dalam proses pelaporan keuangan.					
2	Informasi keuangan cukup mudah diperoleh saat diperlukan.					
3	Unit kerja melibatkan pihak terkait dalam proses perencanaan dan evaluasi keuangan.					
4	Pengelolaan keuangan di unit kerja dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.					
5	Masalah keuangan di unit kerja biasanya ditindaklanjuti sesuai prosedur.					
6	Telah diterapkan mekanisme pengawasan internal yang efektif untuk manajemen keuangan.					
Pemanfaatan Teknologi Informasi						
1	Pencatatan transaksi keuangan dilakukan menggunakan sistem komputerisasi.					

NO	DAFTAR PERTANYAAN	JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
2	Sistem komputerisasi membantu mempercepat proses pelaporan keuangan.					
3	Jaringan komputer membantu pertukaran informasi antar unit kerja.					
4	Sebagian besar proses akuntansi telah dilakukan secara terkomputerisasi.					
Sistem Pengendalian Internal						
1	Pimpinan memberikan contoh yang baik dalam mematuhi aturan.					
2	Penilaian risiko dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam pengelolaan keuangan.					
3	Pembagian tugas kerja antarpegawai telah ditetapkan dengan cukup jelas.					
4	Hasil pemeriksaan auditor digunakan sebagai bahan perbaikan.					
5	Pengawasan rutin dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan keuangan.					
Kualitas Laporan Keuangan						
1	Informasi dalam laporan keuangan					

	membantu proses evaluasi dan pengambilan keputusan.					
2	Laporan keuangan biasanya disusun sesuai waktu yang ditetapkan.					
3	Laporan keuangan menyajikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.					
4	Informasi dalam laporan keuangan dapat dicek kembali oleh pihak lain.					
5	Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya.					
6	Informasi dalam laporan keuangan cukup mudah dipahami.					

Lampiran 5. Hasil data kuisioner

<i>Good Governance (X1)</i>						
No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
1	4	4	3	4	5	4
2	5	3	4	4	4	4
3	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	4	5
6	5	4	5	5	5	5
7	5	5	5	4	5	3
8	5	5	5	4	5	5

9	4	5	4	4	5	5
10	4	4	4	4	2	4
11	5	5	5	5	5	5
12	4	1	3	3	4	3
13	2	3	3	3	2	5
14	5	3	4	4	4	4
15	3	2	3	2	3	4
16	5	4	5	4	5	5
17	5	5	5	5	5	5
18	1	1	2	1	3	1
19	4	4	4	4	4	4
20	5	5	4	3	4	4
21	4	5	4	4	4	5
22	4	5	5	4	5	5
23	5	5	5	5	5	5
24	4	3	3	3	4	3
25	4	5	3	4	4	5
26	5	4	5	4	5	5
27	4	5	5	5	5	5
28	4	4	3	4	3	3
29	2	2	3	2	3	3
30	5	5	5	5	4	5

31	5	5	5	5	5	5
32	5	4	5	4	5	4
33	2	3	3	4	2	3
34	4	5	4	5	4	5
35	5	5	5	5	4	5
36	5	5	5	5	4	5
37	3	3	4	3	2	3
38	3	3	3	4	4	4
39	5	5	4	5	5	5
40	4	4	4	4	3	3
41	5	4	5	5	4	5
42	3	2	3	3	3	2
43	3	2	3	3	3	4
44	5	4	5	5	5	5
45	3	3	2	2	2	3
46	4	4	5	4	4	4
47	5	5	5	5	5	5
48	4	3	3	4	5	4
49	3	3	4	3	4	4
50	4	5	5	5	5	5
51	5	5	5	4	5	5
52	4	4	4	4	4	3

53	4	4	4	5	5	4
54	4	4	4	5	4	5
55	5	5	4	4	5	4
56	4	5	3	4	4	4
57	3	3	4	4	4	3
58	4	5	4	5	4	5
59	3	2	4	3	3	3
60	3	5	5	5	4	4
61	3	5	5	4	5	5
62	5	5	5	5	5	5
63	5	5	5	5	5	5
64	5	5	5	5	5	5
65	5	5	4	4	5	5
66	4	4	3	4	5	4
67	4	3	4	4	3	4
68	4	4	3	5	5	4
69	4	4	4	5	5	5
70	3	3	3	3	3	3
71	2	3	2	2	2	2
72	5	4	5	4	5	4
73	4	4	4	5	4	5
74	5	5	5	5	4	5

75	5	4	5	5	4	4
76	3	5	3	5	3	4
77	4	5	5	4	4	5
78	4	4	4	5	4	4
79	5	5	3	5	5	5
80	5	5	4	4	5	4
81	3	3	4	4	3	4
82	4	5	5	5	5	5
83	4	5	5	4	5	4
84	4	4	4	4	4	3
85	4	3	4	4	4	4
86	3	3	3	3	3	3
87	2	3	3	2	4	2
88	3	4	4	5	5	4
89	5	5	4	5	4	5
90	4	3	4	4	3	4
91	4	2	3	3	3	3
92	5	5	5	5	5	5
93	5	5	5	5	5	5
94	3	4	4	4	4	3
95	2	3	3	2	2	2
96	4	3	3	1	3	3

97	5	5	5	5	5	5
98	5	5	5	4	5	5
99	5	3	4	4	4	4
100	4	4	4	5	5	5
101	3	4	4	3	4	4
102	4	4	5	5	5	4
103	4	4	4	5	3	4
104	3	3	4	3	3	4
105	4	3	3	5	4	4
106	5	5	5	5	5	5
107	4	4	4	3	4	5
108	4	3	5	4	3	3
109	4	5	5	5	5	5
110	5	5	4	5	5	5
111	4	4	4	4	4	4
112	5	5	5	5	5	5
113	5	4	5	5	4	5
114	5	5	5	5	5	5
115	5	5	5	4	4	5
116	3	4	3	4	4	3
117	5	5	5	5	5	5
118	4	5	5	5	4	4

119	4	5	4	5	4	4
120	5	4	5	5	5	5
121	5	5	5	5	5	5
122	3	3	5	4	5	4
123	5	5	4	5	3	4
124	4	4	5	5	5	5
125	4	5	4	5	4	4
126	5	4	5	5	4	4
127	2	4	3	3	3	4
128	5	4	5	4	3	5
129	4	4	4	4	5	4
130	4	3	4	5	5	5
131	3	3	4	3	3	4
132	4	4	4	5	4	5

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)				
No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
1	5	4	5	5
2	5	5	5	4
3	4	3	4	3
4	5	3	4	4

5	4	4	4	4
6	3	3	3	4
7	4	4	5	4
8	5	5	5	4
9	3	4	5	4
10	4	3	3	2
11	3	4	4	4
12	4	3	4	4
13	4	4	4	4
14	4	4	4	4
15	5	4	5	5
16	4	4	4	3
17	5	5	5	5
18	5	4	4	5
19	4	5	5	4
20	4	5	4	4
21	5	5	5	5
22	4	4	5	3
23	5	5	5	5
24	5	5	5	5
25	5	5	5	5
26	3	4	4	4

27	5	5	5	5
28	5	5	5	5
29	5	4	4	4
30	5	5	5	4
31	5	5	4	5
32	5	5	4	5
33	4	5	4	3
34	4	4	4	3
35	5	5	5	5
36	2	4	2	3
37	4	2	4	4
38	5	5	5	5
39	4	5	5	4
40	4	5	5	4
41	4	4	4	3
42	4	5	4	5
43	5	4	5	5
44	2	3	3	4
45	3	2	3	3
46	3	4	3	4
47	3	3	4	5
48	5	4	4	4

49	5	4	3	3
50	4	5	5	4
51	4	5	5	5
52	5	5	5	5
53	5	4	4	5
54	5	5	5	5
55	5	5	5	5
56	4	5	4	4
57	5	5	4	5
58	4	4	5	4
59	5	5	4	4
60	4	5	5	4
61	5	4	4	4
62	5	5	5	5
63	5	5	5	5
64	3	2	3	3
65	4	5	5	4
66	3	4	4	4
67	4	4	5	5
68	5	4	5	5
69	5	5	5	5
70	5	5	5	5

71	2	3	4	3
72	5	5	5	5
73	5	5	5	5
74	3	2	3	3
75	4	4	3	3
76	5	5	5	5
77	5	4	4	4
78	4	4	5	4
79	4	3	4	3
80	4	5	4	4
81	4	3	3	5
82	4	2	3	3
83	5	5	5	5
84	4	5	5	5
85	5	5	5	5
86	4	5	4	5
87	5	4	5	5
88	5	3	5	5
89	4	2	4	4
90	4	4	4	3
91	3	3	3	3
92	5	5	5	5

93	5	4	5	5
94	5	5	5	4
95	2	2	2	2
96	5	5	4	5
97	4	4	2	5
98	4	3	4	4
99	4	3	4	3
100	5	5	5	5
101	4	4	4	4
102	5	5	4	5
103	4	3	4	4
104	5	5	4	4
105	1	1	1	2
106	4	5	4	4
107	5	5	5	5
108	5	5	5	5
109	3	4	4	4
110	5	5	5	5
111	5	4	4	4
112	5	5	5	5
113	2	3	2	2
114	5	4	5	5

115	4	4	5	4
116	3	3	3	4
117	4	4	5	5
118	4	4	4	5
119	4	5	5	5
120	3	3	3	4
121	4	5	4	4
122	4	5	5	5
123	5	5	4	5
124	2	3	3	4
125	3	3	4	5
126	4	5	5	5
127	5	5	5	5
128	5	5	5	4
129	2	4	3	2
130	3	3	4	4
131	4	5	3	5
132	4	5	5	5

Sistem Pengendalian Internal (X3)					
No	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
1	5	5	5	5	5

2	3	4	4	3	4
3	5	5	5	5	5
4	4	5	4	5	4
5	5	5	5	5	5
6	3	1	3	3	4
7	3	4	4	3	4
8	3	4	4	4	4
9	3	3	3	4	3
10	4	4	4	4	4
11	5	4	4	4	4
12	3	4	4	4	4
13	3	3	4	3	3
14	5	4	5	5	5
15	4	5	4	4	4
16	5	5	5	5	5
17	5	4	5	4	5
18	4	4	3	4	5
19	5	5	5	5	5
20	3	3	3	3	3
21	5	5	5	5	5
22	3	3	3	3	4
23	3	3	3	3	2

24	5	5	5	5	5
25	5	5	5	5	5
26	4	3	4	4	4
27	5	5	5	5	5
28	3	4	3	4	5
29	1	2	1	1	2
30	5	5	5	5	4
31	4	4	4	5	4
32	4	4	4	4	4
33	4	4	4	3	4
34	5	4	5	5	5
35	3	4	4	4	4
36	4	4	5	4	4
37	5	4	4	5	4
38	5	5	5	5	5
39	4	4	4	4	5
40	2	2	4	4	3
41	5	5	5	5	5
42	5	5	5	5	5
43	5	5	5	5	5
44	5	4	4	5	5
45	4	3	1	3	3

46	5	4	5	5	5
47	4	5	5	4	5
48	4	4	4	5	5
49	5	5	5	5	5
50	4	5	5	5	5
51	3	2	3	4	3
52	5	5	4	5	4
53	4	4	5	3	5
54	4	5	5	4	5
55	5	5	5	5	5
56	4	4	3	3	4
57	5	5	4	4	4
58	5	5	3	4	5
59	5	5	5	5	5
60	5	5	5	5	5
61	4	2	4	3	4
62	4	4	4	5	4
63	2	3	2	3	2
64	5	5	5	5	5
65	3	4	4	4	4
66	4	4	5	2	4
67	4	5	5	5	4

68	4	3	3	4	4
69	5	5	5	5	5
70	5	4	4	4	4
71	3	3	3	3	2
72	5	5	5	5	5
73	5	5	5	5	4
74	4	3	4	3	5
75	3	4	5	3	3
76	5	5	5	5	4
77	4	4	5	4	4
78	3	4	5	5	4
79	5	4	5	4	4
80	4	4	2	3	2
81	4	3	4	2	2
82	5	5	5	4	4
83	5	5	4	5	5
84	5	5	5	5	5
85	4	5	5	5	5
86	5	4	4	4	5
87	5	5	5	5	5
88	5	5	4	5	5
89	3	4	3	3	3

90	4	5	5	5	4
91	4	4	4	3	3
92	4	4	5	5	5
93	4	3	4	4	3
94	4	4	5	5	4
95	4	3	5	4	4
96	5	5	4	5	5
97	3	5	4	4	4
98	3	5	5	3	4
99	2	2	3	3	3
100	4	5	5	4	5
101	4	3	4	3	3
102	5	5	5	5	5
103	5	5	3	5	5
104	5	5	5	5	5
105	2	4	3	4	4
106	3	4	4	3	4
107	4	4	5	4	5
108	3	4	5	5	4
109	5	5	5	5	5
110	5	5	5	5	5
111	3	5	5	5	4

112	5	5	5	5	5
113	3	3	3	2	3
114	4	3	3	4	3
115	5	5	5	5	5
116	5	5	4	3	5
117	5	5	5	5	4
118	5	4	3	3	4
119	3	3	4	5	4
120	3	2	2	2	2
121	5	5	5	5	5
122	5	5	5	5	5
123	5	4	4	5	4
124	5	5	5	5	5
125	4	5	4	4	4
126	4	3	3	2	3
127	3	4	3	4	4
128	4	3	3	5	4
129	2	3	3	2	2
130	3	3	4	4	4
131	4	4	4	4	4
132	5	5	5	5	5

Kualitas Laporan Keuangan (Y)						
No	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6
1	5	5	5	5	5	5
2	4	5	5	5	5	4
3	4	5	5	5	4	5
4	5	5	5	5	5	5
5	5	4	5	5	5	5
6	3	4	2	4	4	5
7	4	3	5	5	5	4
8	5	5	5	5	5	5
9	5	4	5	4	4	5
10	5	4	4	3	4	5
11	5	4	4	4	5	5
12	4	3	3	4	4	4
13	3	3	4	2	4	3
14	3	4	5	4	3	3
15	4	3	2	3	2	3
16	4	3	4	5	5	4
17	5	4	5	3	5	4
18	4	3	3	3	4	3
19	4	4	5	5	5	5
20	5	4	4	3	4	4

21	5	5	5	5	5	5
22	2	4	4	4	3	4
23	3	4	5	3	4	3
24	5	5	5	5	5	5
25	5	5	5	5	5	5
26	5	4	5	5	4	5
27	5	5	5	5	5	5
28	4	3	4	4	4	4
29	2	1	1	2	2	2
30	5	5	5	5	5	5
31	5	5	5	5	5	5
32	5	5	5	4	3	4
33	5	3	5	3	5	5
34	5	5	5	5	5	5
35	5	4	4	5	5	4
36	4	3	4	4	1	4
37	3	4	5	4	4	4
38	5	3	3	3	3	5
39	5	5	5	3	3	5
40	3	3	4	4	4	3
41	5	5	5	5	5	5
42	5	4	5	5	5	5

43	5	3	4	4	4	4
44	4	5	5	4	5	5
45	4	2	2	3	3	3
46	5	5	5	5	4	5
47	5	5	4	4	4	5
48	4	5	5	4	4	4
49	4	4	5	3	5	5
50	4	5	4	5	4	4
51	5	5	4	5	4	5
52	5	5	4	4	4	5
53	5	4	4	5	4	4
54	5	5	5	5	5	5
55	5	5	5	5	5	5
56	4	2	4	4	5	5
57	5	3	3	5	4	5
58	5	5	5	5	4	5
59	4	5	3	4	4	5
60	5	5	5	5	5	5
61	4	5	4	4	4	5
62	3	5	4	4	4	4
63	4	4	4	4	3	4
64	5	5	5	5	5	5

65	5	5	5	4	5	4
66	4	4	4	3	4	4
67	4	4	5	3	5	4
68	5	3	4	4	4	4
69	4	4	4	5	4	5
70	3	3	2	2	4	3
71	1	4	3	3	3	1
72	4	4	5	5	5	5
73	5	5	5	5	5	5
74	5	5	4	5	5	5
75	5	5	5	5	5	5
76	5	5	4	5	4	4
77	4	3	3	3	4	3
78	5	5	5	5	5	5
79	4	4	5	5	5	4
80	5	4	5	5	3	4
81	3	4	3	3	4	4
82	5	5	4	5	5	5
83	5	5	4	5	5	4
84	5	3	5	4	5	4
85	5	4	4	5	4	5
86	5	5	4	5	5	5

87	4	4	4	5	4	2
88	5	5	5	5	5	5
89	4	5	3	5	4	4
90	3	3	3	4	4	4
91	3	3	3	2	4	3
92	4	5	4	5	5	5
93	5	4	4	4	4	5
94	5	3	4	4	5	5
95	4	4	2	3	2	2
96	5	5	5	4	3	4
97	4	5	4	5	4	5
98	5	5	4	5	5	5
99	4	4	4	4	3	4
100	4	5	4	5	5	5
101	3	5	4	4	4	4
102	5	5	5	5	5	5
103	4	5	4	4	3	5
104	5	4	4	3	4	3
105	3	2	4	5	3	3
106	4	5	5	4	5	5
107	5	4	5	5	4	5
108	5	5	5	4	5	5

109	3	4	5	4	2	5
110	5	5	5	4	5	4
111	5	5	4	3	4	3
112	5	5	5	5	5	5
113	3	4	3	2	3	4
114	4	4	3	4	4	5
115	5	4	5	3	5	5
116	4	4	4	5	4	4
117	5	5	5	4	5	4
118	5	5	4	4	4	5
119	3	3	4	5	4	4
120	4	4	4	4	4	5
121	5	3	4	4	5	4
122	5	5	5	5	5	5
123	5	5	5	5	5	5
124	5	5	5	5	4	4
125	3	3	4	3	4	3
126	5	5	5	5	5	5
127	5	4	5	5	5	5
128	4	4	5	4	4	5
129	2	3	3	3	3	2
130	3	3	2	5	2	2

131	5	5	5	4	4	4
132	5	5	5	4	5	5

Lampiran 6. Hasil uji SPSS

1. Uji Validitas

a. *Good Governance* (X1)

		Correlations						
		GG 1	GG2	GG 3	GG 4	GG 5	GG 6	JUMLAH X1
GG 1	Pearson Correlation	1	,305	,598**	,156	,588**	,468*	,736**
	Sig. (2-tailed)		,191	,005	,512	,006	,038	<,001
	N	20	20	20	20	20	20	20
GG2	Pearson Correlation	,305	1	,190	,466*	,389	,399	,687**
	Sig. (2-tailed)	,191		,423	,038	,090	,081	<,001
	N	20	20	20	20	20	20	20
GG 3	Pearson Correlation	,598**	,190	1	,047	,492*	,479*	,645**
	Sig. (2-tailed)	,005	,423		,845	,027	,033	,002
	N	20	20	20	20	20	20	20
GG 4	Pearson Correlation	,156	,466*	,047	1	,321	,438	,584**
	Sig. (2-tailed)	,512	,038	,845		,167	,054	,007
	N	20	20	20	20	20	20	20
GG 5	Pearson Correlation	,588**	,389	,492*	,321	1	,413	,758**
	Sig. (2-tailed)	,006	,090	,027	,167		,070	<,001
	N	20	20	20	20	20	20	20
GG 6	Pearson Correlation	,468*	,399	,479*	,438	,413	1	,769**
	Sig. (2-tailed)	,038	,081	,033	,054	,070		<,001
	N	20	20	20	20	20	20	20
JUMLAH X1	Pearson Correlation	,736**	,687**	,645**	,584**	,758**	,769**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	,002	,007	<,001	<,001	
	N	20	20	20	20	20	20	20

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

		Correlations				
		PTI 1	PTI 2	PTI 3	PTI 4	JUMLAH X2
PTI 1	Pearson Correlation	1	,512 [*]	,356	,554 [*]	,749 ^{**}
	Sig. (2-tailed)		,021	,124	,011	<,001
	N	20	20	20	20	20
PTI 2	Pearson Correlation	,512 [*]	1	,624 ^{**}	,725 ^{**}	,876 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,021		,003	<,001	<,001
	N	20	20	20	20	20
PTI 3	Pearson Correlation	,356	,624 ^{**}	1	,525 [*]	,772 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,124	,003		,018	<,001
	N	20	20	20	20	20
PTI 4	Pearson Correlation	,554 [*]	,725 ^{**}	,525 [*]	1	,857 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	,011	<,001	,018		<,001
	N	20	20	20	20	20
JUMLAH X2	Pearson Correlation	,749 ^{**}	,876 ^{**}	,772 ^{**}	,857 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	20	20	20	20	20

c. Sistem Pengendalian Internal (X3)

		Correlations					
		SPI 1	SPI 2	SPI 3	SPI 4	SPI 5	JUMLAH X3
SPI 1	Pearson Correlation	1	,611**	,427	,517*	,442	,746**
	Sig. (2-tailed)		,004	,060	,020	,051	<,001
	N	20	20	20	20	20	20
SPI 2	Pearson Correlation	,611**	1	,619**	,498*	,678**	,882**
	Sig. (2-tailed)	,004		,004	,025	,001	<,001
	N	20	20	20	20	20	20
SPI 3	Pearson Correlation	,427	,619**	1	,524*	,380	,719**
	Sig. (2-tailed)	,060	,004		,018	,098	<,001
	N	20	20	20	20	20	20
SPI 4	Pearson Correlation	,517*	,498*	,524*	1	,535*	,767**
	Sig. (2-tailed)	,020	,025	,018		,015	<,001
	N	20	20	20	20	20	20
SPI 5	Pearson Correlation	,442	,678**	,380	,535*	1	,809**
	Sig. (2-tailed)	,051	,001	,098	,015		<,001
	N	20	20	20	20	20	20
JUMLAH X3	Pearson Correlation	,746**	,882**	,719**	,767**	,809**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	20	20	20	20	20	20

d. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

		Correlations						
		KL1	KL2	KL3	KL4	KL5	KL6	JUMLAH Y
KL1	Pearson Correlation	1	,528*	,498*	,348	,519*	,857**	,890**
	Sig. (2-tailed)		,017	,025	,133	,019	<,001	<,001
	N	20	20	20	20	20	20	20
KL2	Pearson Correlation	,528*	1	-,061	,000	,246	,462*	,497*
	Sig. (2-tailed)	,017		,800	1,000	,295	,040	,026
	N	20	20	20	20	20	20	20
KL3	Pearson Correlation	,498*	-,061	1	,582**	,065	,655**	,694**
	Sig. (2-tailed)	,025	,800		,007	,787	,002	<,001
	N	20	20	20	20	20	20	20
KL4	Pearson Correlation	,348	,000	,582**	1	,180	,476*	,626**
	Sig. (2-tailed)	,133	1,000	,007		,447	,034	,003
	N	20	20	20	20	20	20	20
KL5	Pearson Correlation	,519*	,246	,065	,180	1	,395	,543*
	Sig. (2-tailed)	,019	,295	,787	,447		,085	,013
	N	20	20	20	20	20	20	20
KL6	Pearson Correlation	,857**	,462*	,655**	,476*	,395	1	,927**
	Sig. (2-tailed)	<,001	,040	,002	,034	,085		<,001
	N	20	20	20	20	20	20	20
JUMLAH Y	Pearson Correlation	,890**	,497*	,694**	,626**	,543*	,927**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	,026	<,001	,003	,013	<,001	
	N	20	20	20	20	20	20	20

2. Uji Reabilitas

a. *Good Governance* (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,787	6

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,827	4

c. Sistem Pengendalian Internal (X3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.841	5

d. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.788	6

3. Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
GG1	132	1	5	4.09	.912
GG2	132	1	5	4.07	.974
GG3	132	2	5	4.16	.827
GG4	132	1	5	4.19	.934
GG5	132	2	5	4.14	.892
GG6	132	1	5	4.23	.870
PTI1	132	1	5	4.19	.901
PTI2	132	1	5	4.18	.940
PTI3	132	1	5	4.25	.850
PTI4	132	2	5	4.24	.830
SPI1	132	1	5	4.12	.925
SPI2	132	1	5	4.16	.915
SPI3	132	1	5	4.20	.914
SPI4	132	1	5	4.17	.942
SPI5	132	2	5	4.20	.869
KLK1	132	1	5	4.34	.855
KLK2	132	1	5	4.21	.883
KLK3	132	1	5	4.26	.879
KLK4	132	2	5	4.23	.861
KLK5	132	1	5	4.23	.852
KLK6	132	1	5	4.33	.871
Good Governance	132	9	30	24.88	4.489
Pemanfaatan Teknologi Informasi	132	5	20	16.86	2.991
Sistem Pengendalian Internal	132	7	25	20.85	3.873
Kualitas Laporan Keuangan	132	10	30	25.60	3.965
Unstandardized Residual	132	-6.97711	5.99435	.0000000	2.75428658
ABS_RES	132	.03	6.98	2.1486	1.71296
Valid N (listwise)	132				

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		132
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.75428658
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.037
	Negative	-.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1							
	(Constant)	1.964	2.083	.943	.348		
	Good Governance	.377	.054	.427	.6935	.993	1.007
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.289	.085	.218	3.391	.001	1.096
	Sistem Pengendalian Internal	.450	.066	.439	6.820	.000	1.100

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

c. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
	(Constant)	3.831	1.281	2.991	.003
	Good Governance	-.018	.033	-.047	.540
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.003	.052	.005	.959
	Sistem Pengendalian Internal	-.061	.041	-.139	.133

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

5. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.719 ^a	.518	.506	2.786

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

6. Uji Hipotesis

a. Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1	Regression	1065.941	3	355.314	.000 ^b
	Residual	993.778	128	7.764	
	Total	2059.720	131		

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi

b. Uji T

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.964	2.083		.943	.348
	Good Governance	.377	.054	.427	6.935	.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.289	.085	.218	3.391	.001
	Sistem Pengendalian Internal	.450	.066	.439	6.820	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

7. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.964	2.083		.943	.348
	Good Governance	.377	.054	.427	6.935	.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.289	.085	.218	3.391	.001
	Sistem Pengendalian Internal	.450	.066	.439	6.820	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Lampiran 7. Dokumentasi

a. Dokumentasi di Inspektorat



b. Dokumentasi satpol PP



c. Dokumentasi bangkesbangpol



d. Dokumentasi BKPSDM



e. Dokumentasi BKAD



f. Dokumentasi Kec. Blimbing



g. Dokumentasi Kec. Kedungkandang



h. Dokumentasi Kec. Klojen



i. Dokumentasi Kec. lowokwaru



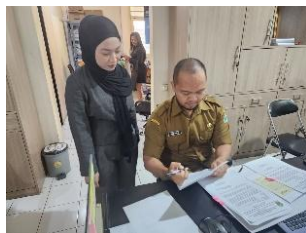
j. Dokumentasi Kec. Sukun



k. Dokumentasi DISPORAPAR



l. Dokumentasi DISKOPINDAG



m. Dokumentasi DLH



n. Dokumentasi DISDIKBUD



o. Dokumentasi DISHUB



p. Dokumentasi DPUPRKP



q. Dokumentasi DINSOS



r. Dokumentasi Diskominfo

